

**A B S T R A K**

Judul	: Kajian Memorial Presidensial
Tebal	: (V+79 halaman)
Referensi	: 23 Buku
Unit Kerja	: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

*Kajian Memorial Presidensial merupakan upaya untuk mengetahui pengelolaan memorial dengan memperhatikan segala komponen aspek kebijakan, standar/pedoman, kelembagaan, sistem pengelolaan arsip (terutama terkait dengan akuisisi dan pemeliharaan), sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya pendukung lainnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan.*

*Survei dilakukan di Malaysia dan Thailand, dan beberapa memorial dan museum di dalam negeri. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kisi-kisi wawancara sebagai instrumen dan beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan memorial, yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan umum (grand tour question) yaitu bagaimanakah pengelolaan memorial?*

*Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan memorial merupakan salah satu bentuk tipologi dari museum yang mengkhususkan pada kegiatan preservasi dan diseminasi koleksi yang menceritakan individu/perorangan, yang telah berjasa dan berperan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Koleksi dari memorial berupa macam-macam jenis dokumen, yaitu artefak, arsip, dan bahan pustaka.*

*ANRI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang kearsipan sesuai dengan visi dan misinya dapat membangun memorial presiden dengan mengutamakan pengkhususan koleksi arsip dari rekam jejak presiden dalam segala bentuk dan medianya. Untuk maksud tersebut dibutuhkan: (1) Kesepakatan dari seluruh jajaran pimpinan birokrat ANRI bahwa rencana pembangunan memorial presiden merupakan bentuk representasi dalam rangka mempertajam visi dan misi ANRI, sekaligus mengenalkan tugas dan fungsi ANRI secara eksplisit kepada masyarakat; (2) Bangunan khusus yang representatif yang mampu menyimpan, memelihara, dan menyajikan koleksi dari beberapa orang presiden, serta dibutuhkan alokasi pendanaan khusus terkait dengan pengelolaan memorial, mulai dari perolehan atau akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, termasuk penyajian (preparasi) arsip, serta menyediakan akses arsip dalam suatu memorial; (3) Reorganisasi struktur kelembagaan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi 'kaya fungsi, miskin struktur', dengan mengefektifkan secara bersama-sama antara pengelolaan memorial presiden dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB).*

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

## **KATA PENGANTAR**

Mengutip David R. Kapley, lembaga kearsipan merupakan bagian dari lembaga informasi publik yang memberikan kontribusi salah satunya yakni mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya. Maka dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, salah satu manifestasi tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya adalah presiden. Karena presiden menempati peran sentral dalam kehidupan bernegara. Maka lembaga kearsipan memiliki kepentingan untuk melestarikan kiprah presiden yang terekam melalui arsip-arsipnya dalam suatu wadah khusus bernama Memorial Presidensial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya Memorial Presidensial. Oleh karena itu, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) pada Tahun Anggaran 2012 melaksanakan Kegiatan Pengkajian tentang Memorial Presidensial.

Kajian ini ditujukan sebagai acuan bagi lembaga kearsipan dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia dalam membangun dan mengembangkan Presidensial Memorial. Kami menyadari kajian ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, setidaknya kajian ini sudah menjawab beberapa permasalahan seputar Memorial Presidensial.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan ANRI, anggota tim, dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengkajian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2012

Kepala Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Rudi Anton

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pertanyaan Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Keterbatasan Penelitian .....	7
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Memori Kolektif .....	8
B. Presiden .....	10
C. Dokumen .....	13
D. Arsip .....	15
E. Museum .....	17
F. Lembaga Kearsipan.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Obyek Penelitian .....	27
C. Definisi Operasional.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Instrumen Penelitian .....	31
F. Teknik Analisa Data.....	31
G. Validasi Data.....	32

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan  
Arsip Nasional Republik Indonesia**

**BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS**

A. Deskripsi Penyelenggaraan Memorial Pemimpin Negara di Beberapa Negara .....	33
B. Deskripsi Penyelenggaraan Museum/Memorial di Indonesia .....	53
C. Model Memorial Presidensial di Indonesia .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	77

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	P. Ramlee Memorial.....	35
Gambar 4.2	<i>Proclamation of Independence Memorial</i> di Melaka.....	36
Gambar 4.3	Tunku Abdul Rahman Putra Memorial.....	37
Gambar 4.4	Tun Abdul Razak Memorial.....	38
Gambar 4.5	Tun Hussein Onn Memorial.....	41
Gambar 4.6	Galleri Seri Perdana.....	42

**DAFTAR TABEL**

Gambar 1.1	Teknik Pengumpulan Data.....	30
------------	------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terekam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Rekaman sejarah perjalanan bangsa itu berfungsi sebagai memori kolektif bangsa dan cerminan dari seluruh komponen kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik melalui lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun perseorangan.

Memori kolektif bangsa tersebut merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai suatu memori kolektif yang terekam dalam bentuk arsip, dilakukan upaya untuk menghubungkan keberlangsungan proses peristiwa masa lalu sebagai sumber informasi, acuan dan pembelajaran bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melestarikan memori kolektif bangsa, maka diperlukan pranata kelembagaan yang mampu menyediakan informasi kepada publik mengenai memori kolektif bangsa, salah satunya lembaga kearsipan.

Menurut David R. Keplly dalam Chaniago (1996, 36), lembaga kearsipan merupakan bagian dari lembaga informasi publik yang memberikan kontribusi untuk: (1) melestarikan warisan budaya masyarakat; (2) memberi inspirasi rasa hormat terhadap kelampauan; (3) memberi kemungkinan kepada pengambilan keputusan dan rakyatnya untuk belajar tentang masa lampau; (4) mengizinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang hak-hak hukum mereka; (5) mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya.

Dengan demikian, lembaga kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya, termasuk dalam bentuk khazanah arsip. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

tentang Kearsipan, kehadiran lembaga kearsipan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai suatu kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Keberadaan lembaga kearsipan menjadi kebutuhan bangsa dalam mewariskan informasi sejarah perjalanan bangsa kepada generasi yang akan datang.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang dihadirkan merupakan masa-masa periodisasi dari masa pra kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan, masa pembangunan, dan masa reformasi. Pembagian periodisasi lebih kepada pergolakan yang dialami bangsa Indonesia secara keseluruhan, berikut peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Sebagai suatu bangsa dan negara, sejarah kepemimpinan secara langsung terjadi seiring dengan bentuk pemerintahan pasca kemerdekaan yang dianutnya, yaitu presidensial.

Sistem presidensial merupakan salah satu komponen dari tatanan politik yang mencoba mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem presidensial, menurut Ramlan Surbakti (1998, :13), fungsi-fungsi negara dalam mencapai tujuan negara yang dimaksud meliputi pembuatan peraturan (legislatif), penerapan peraturan (eksekutif), dan penghakiman peraturan (yudikatif). Kepala pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Presiden dan semua menteri merupakan pembantu presiden yang bertanggung jawab terhadap presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Oleh karenanya, presiden terpilih merupakan hasil demokrasi dari pemilihan umum.

Dengan sendirinya, setiap pemerintahan yang dipimpin oleh presiden mempunyai kekhasan yang berbeda satu sama lain, baik dari program kerja pemerintahan, seni memimpin, cara berdiplomasi, komunikasi dengan masyarakatnya dan sebagainya yang senantiasa mewarnai perjalanan seorang presiden.

Rekam jejak perjalanan seorang presiden dalam masa kepemimpinannya maupun perjalanan karier sebelumnya, perlu diketahui masyarakat luas. Oleh karenanya, pembangunan 'presidensial memorial' sebagai wadah/wahana koleksi seorang presiden diharapkan mampu menuntaskan keingintahuan masyarakat terhadap figur seorang presiden. Koleksi mengenai pemimpin negara ini telah dilakukan oleh negara-negara lain,



## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

termasuk negara tetangga Malaysia dan Thailand. Namun di Indonesia, koleksi mengenai pemimpin negara belum dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, seperti Museum Purna Bhakti yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, yang mengumpulkan dan menyimpan semua koleksi cendera mata milik HM. Soeharto semasa beliau menjabat sebagai presiden Republik Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Museum ini tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh yayasan. Oleh karenanya, tanggung jawab pemeliharaan berada di yayasan.

Sejauh ini, keberadaan koleksi museum masih berupa 'artefak' meskipun ada sebagian kecil berbentuk arsip. Lebih lanjut, belum pernah ada suatu museum yang menyimpan secara khusus memori presiden dalam bentuk khazanah arsip. Selain itu, tanggungjawab pengelolaan terhadap museum masih berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di sisi lain, memorial di Malaysia menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan (Arkib Negara Malaysia) dan Kementerian Kebudayaan Warisan Kesenian. Memorial pemimpin negara/pemerintahan di Malaysia ini koleksinya juga sebagian besar bukan berupa arsip, lebih kepada barang-barang peninggalan pada saat periode kepemimpinan Perdana Menteri, begitupun dengan memorial-memorial di negara lain.

Dengan demikian, memorial yang mengkhususkan koleksi yang berupa arsip dan sejenisnya belum pernah ada. Khazanah arsip milik perseorangan khususnya presiden apabila itu benar-benar ada menjadi rekam jejak yang menarik untuk diketahui publik, karena menampilkan memori kolektif perseorangan mulai dari terpilihnya seorang presiden melalui proses pemilu sampai dengan akhir masa jabatannya, bahkan bisa saja lebih dari itu, arsip yang ditampilkan mulai dari sejak lahir sampai dengan pengabdian yang terakhir.

Oleh karenanya membangun suatu memorial yang mengkhususkan koleksi yang berasal dari khazanah arsip juga merupakan model memorial yang memerlukan tindakan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus menjamin keselamatan aset nasional

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai identitas, dan jati diri bangsa.

Dengan demikian, keberadaan memorial presidensial menjadi suatu model memorial yang perlu pengkajian khusus, terutama terkait dengan perolehan khazanah arsip dari setiap presiden dalam masa periode tertentu. Begitupun dengan aspek lain yang menyertai pembangunan memorial.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai arahan pimpinan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rapat pimpinan akhir tahun 2011 lalu maka telah dilakukan pengajuan program mengenai Kajian Presidensial Memorial oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, khususnya Bidang Sistem Kearsipan Statis pada Tahun Anggaran 2012 ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap perlu atau tidaknya pembangunan memorial di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang diciptakan oleh perseorangan khususnya seorang presiden, merefleksikan capaian prestasi karier selama dirinya memimpin negara dan pemerintahan, serta sebagai pilar peradaban suatu bangsa karena segala kebijakan strategis yang dihasilkan selama masa periode kepemimpinannya menjadi tonggak pembangunan peradaban suatu bangsa.

Presiden dengan segala kekuasaan eksekutif yang dimilikinya mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan politik suatu bangsa. Oleh karena itu, arsip yang tercipta dari seorang presiden pada masa periode tertentu sesuai dengan jabatannya menjadi bukti prestasi karya bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, serta menghadapi situasi global dan perkembangan internasional.

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Untuk mengumpulkan semua capaian prestasi dan karya bangsa dari seorang presiden termasuk rekam jejak perjalanannya dari sejak lahir, mengikuti pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat sebelum menjabat presiden, dibutuhkan suatu tempat atau bangunan khusus yang mampu mengelola, memelihara dan menyajikan khazanah arsip yang dihasilkan tersebut kepada publik. Bangunan tempat yang dimaksud menyerupai suatu museum hanya saja koleksi yang dimilikinya lebih kepada memori tertentu yang dimiliki perseorangan, dalam hal ini seorang presiden. Memorial presiden ini nantinya dapat diketahui dan dilihat langsung oleh publik dan informasinya menjadi pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

Begitu strategisnya keberadaan memorial presiden maka pembangunan memorial presiden menjadi suatu keniscayaan guna memenuhi amanat Pasal 3 (huruf h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Karena itu pembangunan memorial presiden di Indonesia harus dilakukan dengan persiapan matang, dengan memperhatikan segala komponen aspek kebijakan, standar/pedoman, kelembagaan, sistem pengelolaan arsip (terutama terkait dengan akuisisi dan pemeliharaan), sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana, serta sumber daya pendukung lainnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan.

Bertolak dari pemikiran diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian dalam bentuk rumusan deskriptif terhadap memorial presiden. Adapun rumusan deskriptif dalam penelitian ini adalah 'Bagaimanakah pengelolaan memorial?'. Hasil rumusan deskriptif dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya pembangunan memorial presiden oleh ANRI.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian presidensial memorial ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan memorial. Karena itu pertanyaan umum penelitian ini (*grand tour question*) adalah: "Bagaimanakah pengelolaan memorial?"

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Untuk lebih fokus, maka pertanyaan umum diatas diuraikan dalam rumusan pertanyaan khusus (*sub questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek kelembagaan memorial?
2. Bagaimana aspek objek/materi arsip memorial?
3. Bagaimana aspek sistem pengelolaan memorial?
4. Bagaimana aspek prasarana dan sarana memorial?
5. Bagaimana aspek SDM memorial?
6. Bagaimana aspek akses publik memorial?

Dari jawaban atas pertanyaan diatas baik itu *grand tour question* maupun *sub question* diharapkan diperoleh suatu model untuk membangun dan mengelola memorial presiden di Indonesia.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disajikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan yang perlu dilakukan ANRI dalam mengelola memorial presiden, dengan tujuan rinci sebagai berikut:

1. Mengetahui kelembagaan yang diperlukan dalam memorial presiden;
2. Mengetahui objek/ materi yang diperlukan dalam memorial presiden;
3. Mengetahui sistem pengelolaan arsip yang diperlukan dalam memorial presiden;
4. Mengetahui prasarana dan sarana yang diperlukan dalam memorial presiden;
5. Mengetahui SDM yang diperlukan dalam memorial presiden;
6. Mengetahui akses publik dalam memorial presiden.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian perlu tidaknya pembangunan memorial presiden di Indonesia ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selaku lembaga kearsipan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan nasional dan melaksanakan tugas pemerintah dibidang kearsipan;

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

2. Bappenas, selaku lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan perencanaan dan pembangunan nasional;
3. Sekretariat Presiden, selaku lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi dan tugas mendukung operasional kegiatan presiden;
4. Sekretariat Negara, selaku lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi dan tugas presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan;

## **F. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini berupaya mengetahui secara menyeluruh mengenai perlunya memorial presiden di Indonesia. Namun demikian harus diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Studi banding dalam penelitian ini hanya dilakukan di memorial yang ada di dua negara, dan beberapa tempat museum di dalam negeri yang pada umumnya koleksi memorial tersebut bukan menyimpan khazanah arsip, sehingga penelitian ini lebih banyak memanfaatkan sumber data sekunder sebagai pembandingnya;
2. Keterbatasan informan di lokasi penelitian dalam memberikan data, sehingga data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan terbatas tentang memorial;
3. Ketersediaan dan kompetensi SDM yang terlibat dalam penelitian ini masih minim, baik dalam jumlah maupun pengetahuan dalam bidang metodologi khususnya dalam penelitian kualitatif.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Memori Kolektif**

Memori kolektif merupakan konsep yang menggambarkan memori dalam konteks sekelompok manusia. Sekelompok manusia dalam artian kelompok sosial. Asumsi dasarnya adalah setiap kelompok sosial mengembangkan memori dari masa lampau yang mereka alami. Memori ini terus dilestarikan guna diwariskan pada generasi mendatang (Motti Neigner, Oren Meyers and Eyal Zandberg, eds:2011). Dalam penjabaran konsep memori kolektif ini, kelompok sosial merujuk kepada bangsa.

Memori kolektif sebuah bangsa dapat dilihat dari memorial atau bangunan-bangunan pengingat yang didirikan oleh suatu bangsa, contoh: Monumen Pancasila Sakti di Indonesia, Vietnam Veterans War Memorial di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan memorial-memorial ini, setiap bangsa memiliki mekanisme pemilahan untuk hal-hal apa saja yang layak diingat dan dibuat dalam rupa bangunan memorial atau apa saja yang tidak layak untuk diingat. Dari sini, mengenai apa yang perlu dibuat dalam suatu bangunan memorial dan yang tidak perlu dapat dijadikan suatu indikator bagi memori kolektif dari suatu bangsa (Neigner, Meyers, and Zanberg: 2011).

Pandangan Paul Ricoeur menarik untuk dicermati terkait dengan pemilahan antara mana yang diingat dan mana yang tidak diingat dari suatu bangsa, dalam tulisan mengenai *memory, history, forgetting*, Paul berargumen bahwa sejarah yang akan direkonstruksi oleh sebuah bangsa atau negara merupakan sebuah proses untuk memilah mana yang akan diingat dan mana yang akan dilupakan. Hal yang akan diingat kemudian direproduksi dan disebarluaskan sebagai memori kolektif. Sementara sesuatu yang ingin dilupakan, dihapus dan dibiarkan tersimpan atau malah bahkan dimusnahkan, tidak disebarluaskan (Paur Ricoeur: 2006). Logikanya sederhana, Robert Gildea menjelaskan kebijakan yang terlahir mengenai sebuah memori kolektif bangsa di bangun atas pertimbangan keamanan. Rekonstruksi sebuah bangsa atau

negara dalam membangun memori kolektif yang berakar pada sejarah selalu dibangun diatas dasar dua pondasi yakni memori yang terfragmentasi di kepala-kepala individu dan memori yang dinarasikan kembali oleh politisi, media, penulis termasuk didalamnya sejarawan. Untuk pondasi yang kedua, Robert menyebutnya sebagai mitos. Bukan dalam artian berita bohong atau fiktif, melainkan dalam artian sebuah narasi atas suatu peristiwa yang telah dikonstruksikan sedemikian rupa demi kepentingan tertentu. Dari inilah kedua pondasi inilah memori kolektif dikembangkan. Memori kolektif ini kemudian diimplementasikan melalui kebijakan tertentu. Kebijakan ini dipancarkan dengan melalui rekapipta masa lalu yang kemudian dijelaskan sebagai legitimasi bagi keberlangsungan kebijakan tersebut (Robert Gildea: 2004)

Memori kolektif dapat dilihat dari 5 (lima) karakteristik berikut (Neigner, Meyers, and Zanberg: 2011):

1. Memori kolektif merupakan konstruksi sosial politik. Kendati terdapat benda atau catatan autentik tapi tafsiran atasnya merupakan sesuatu yang sangat politis sebab berkaitan dengan suatu rezim inilah mengapa seringkali disebut tidak dapat dilacak bukti atau gambaran mengenai masa lampau. Karena semua merupakan masalah rekapipta sebagaimana disebut Roberts Gildea;
2. Konstruksi memori kolektif berlangsung secara terus menerus dalam suatu proses yang begitu beragam. Keadaan saat ini dan kepercayaan membentuk cara bagaimana melihat masa lampau dan sebaliknya referensi yang dipelajari dari masa lampau membentuk pemahaman untuk membaca masa kini;
3. Memori kolektif bersifat fungsional. Memori kolektif digunakan oleh kelompok sosial guna memperingati masa lalu mereka guna memberikan contoh moral dan memetik nilai dari kesalahan yang pernah dibuat;
4. Memori kolektif harus dikonkretkan. Memori kolektif harus di konkretkan dalam bentuk material seperti ritual peringatan, monumen, museum, sistem pendidikan dan berbagai bentuk lainnya;
5. Memori kolektif bersifat narasi. Memori kolektif harus memiliki penjelasan terstruktur sebagaimana pola budaya yang familiar di masyarakat.

Dari uraian diatas jelas bahwa memori kolektif mengenai ingatan yang telah dipilih, dikonstruksikan secara sosial politis, dan secara konkret dapat

dilihat dari bangunan memorial yang diwujudkan guna mengenang suatu peristiwa tertentu yang dipandang penting oleh suatu bangsa.

## **B. Presiden**

Presiden dalam Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI, (2008: 167). Berdasarkan etimologi bahasa, Presiden berasal dari bahasa latin *presidere* (“to *preside* yang artinya untuk memimpin) terdiri dari suku kata *prae* yang artinya didepan dan *sedere* artinya menduduki. Dalam bahasa Indonesia, kata Presiden dipergunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*) dalam negara yang berbentuk pemerintahan republik. Dalam bahasa Inggris, untuk lingkungan jabatan digunakan istilah “*presidency*” dan untuk pemangku jabatan digunakan istilah “*president*”.(Bagir Manan, 2008,1). Istilah “Presiden” merupakan sebutan bagi Kepala Negara yang disepakati dalam sidang BPUPKI tahun 1945. (Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995). Oleh karena itu, dalam UUD 1945, penggunaan kata “presiden” menunjukkan pejabat. Hal ini tampak dari rumusan-rumusan yang menyebut Presiden, misalnya “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli”, “Presiden...dipilih...dengan suara terbanyak. Tetapi karena “Presiden” adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan. (Bagir Manan, 2008, 2)

Menurut Jimly Asshiddiqie, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan bahkan tidak terbedakan satu sama lain. Oleh karena dalam jabatan Presiden itu tercakup dua kualitas kepemimpinan



# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka pemegang jabatan presiden (*ambtsdrager*) menjadi sangat kuat kedudukannya. Dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan Presiden selalu dibatasi oleh konstitusi dan pengisian jabatan Presiden Republik Indonesia menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Jimly Asshiddiqie; 2006,306)

Pengisian jabatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem tata negara, sebagai pengertian inti dalam hukum tata negara yang mempunyai fungsi sebagai jabatan, jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan adalah pribadi yang khas didefinisikan sebagai hukum mengenai kewenangan (kopetensi) yang mencakup tujuh hal mengenai jabatan yaitu: (Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia; 2001, 70):

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu negara;
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
3. Bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu;
4. Fungsi dari jabatan;
5. Apa kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu;
6. Bagaimana hubungan masing-masing jabatan itu;
7. Sampai batas-batas mana kekuasaan jabatan-jabatan itu.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi. "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar ". Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan antara presiden selaku kedudukan kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. (Jimly Asshiddiqie; 2006. 127)

Dari uraian diatas disebutkan bahwa presiden merupakan suatu jabatan yang disandang. Ketika berbicara mengenai suatu jabatan maka berbicara mengenai posisi seseorang itu dalam konteks masyarakat tertentu. Presiden disini berarti ditempatkan dalam konteks suatu masyarakat yang secara politik menganut sistem presiensial yang menjadikan presiden sebagai

pemimpin tertinggi. Posisi presiden tentunya tidak lepas dari 2 (dua) konsep berikut ini, peran dan status.

Williams mendefinisikan status sebagai posisi, tempat dalam perangkat relasi antar orang. Menurutnya, status-status itu selalu polar atau resiprokal, yakni timbal balik. Status yang satu otomatis mencakup yang lain, misalnya guru-murid, atau dokter-pasien. Baginya *role* atau peran adalah pola perilaku yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan status yang khusus. Hak-hak tertentu, kewajiban dan tanggungjawab merupakan bagian yang terpadu dari penentuan tugas suatu status. Fungsi-fungsinya menjadi peran. Adapun harapan-harapan dalam makna tertentu menjadi suatu istilah. Misalnya, jika kita berkata atau berpikir tentang seorang ayah, biasanya yang kita bayangkan adalah peran yang kita harapkan dari seorang ayah di dalam budaya kita.

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Sukanto, 2000). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Peran menunjuk pada organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus. Dua dimensi peran adalah kewajiban dan hak. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang merupakan kewajiban suatu peran, tindakan atau respon orang lain merupakan hak. Konsep peran dihubungkan dengan konsep status. Dalam penggunaan ini konsep status hanya menunjuk pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi, bukan pada prestise yang terdapat pada seseorang. Sehingga peran-status adalah status struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi (Sofyan Cholid, 2009).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian tugas yang dilakukan seseorang berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat.

Dengan peran dan status yang disandanginya itu, tentunya presiden memiliki kekuasaan atau otoritas. Dalam pandangan Weber, kekuasaan atau

otoritas memiliki legitimasi yang mendasarinya. Terdapat 3 (tiga) bentuk legitimasi yang mendasari kekuasaan atau otoritas, yakni tradisional, kharismatik dan legal formal (Weber: 1978) Tradisional berlandaskan pada keyakinan yang kuat akan kesucian tradisi terdahulu dan legitimasi atas jalannya otoritas berdasar padanya. Sedangkan legitimasi kharismatik disandarkan pada pemujaan terhadap kesucian, heroisme ataupun karakter teladan dari sosok individu, yang memungkinkan terwujudnya pola-pola normatif ataupun keteraturan. Untuk legitimasi legal formal, kekuasaan atau otoritas berlandaskan pada legalitas dari peraturan dan hak atas pemilihan yang dimana otoritas berlangsung dibawah peraturan-peraturan itu. Dengan landasan legitimasi inilah presiden memiliki otoritas untuk mengatur atau memaksa dan dengan begitu pula punya pengaruh yang besar bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini maka sangat mungkin bahwa presiden juga sekaligus sebagai *role model* bagi masyarakatnya. *Role model* adalah peran yang dijadikan acuan oleh individu lainnya. Biasanya yang menjadi *role model* adalah individu-individu yang memiliki pengaruh luas seperti pemimpin politik, selebritis, atlet ataupun lainnya.

### **C. Dokumen**

Dokumen adalah komunikasi langsung yang direkam dalam berbagai wahana seperti buku, citra, foto, atau rekaman suara. Dokumen adalah sebuah objek yang menyajikan informasi. Dokumen merupakan wahana wadah pengetahuan dan ingatan manusia, karena dalam dokumen disimpan pengetahuan yang diperoleh manusia serta segala sesuatu yang diingat manusia dituangkan dalam dokumen (Basuki: 1992).

Ciri dokumen dapat digolongkan dalam 2 kelompok besar:

1. Ciri fisik.

Ciri fisik mencakup tinggi, berat, tata letak, proses pembuatan, frekuensi waktu, dan sejenisnya.

2. Ciri intelektual.

Ciri intelektual menggunakan kriteria seperti tujuan dokumen, isi, subyek, jenis kepengarangan, sumber, metode penyebaran, keaslian karya, ancangan, dan lain-lainnya.

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Karakteristik sebuah dokumen berpengaruh terhadap cara mengolahnya. Berat, tinggi, kemakasan (*hardness*), usia, status pengawetan, kelangkaan dokumen, dan jumlah merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan dan pendayagunaan dokumen.

Sifat dokumen dimulai dengan perbedaan antara dokumen tekstual dengan dokumen non-tekstual. Dokumen tekstual menyajikan isi seluruhnya atau pada hakekatnya dalam bentuk teks tertulis untuk kemudian dibaca oleh si pemakai. Dokumen tekstual mencakup buku, majalah, kompedia statistika, kartu, dokumen administratif, dokumen hukum, katalog, terbitan niaga, paten dan sebagainya.

Dokumen non tekstual mungkin berisi teks tertulis, namun bagian paling penting adalah informasi yang disajikan dalam bentuk lain. Informasi yang disajikan dalam bentuk lain itu dimaksudkan untuk dilihat, didengar, atau dimanipulasikan. Dokumen nontekstual terbagi atas:

- (1) Dokumen ikonik berupa berupa citra atau santir, peta, cetak biru, graf atau grafik, diagram, poster, lukisan, foto, dan slaid atau "side";
- (2) Dokumen suara berupa rekaman suara dan pita suara;
- (3) Dokumen audio-visual merupakan gabungan antara citra dengan saura. Termasuk di dalamnya adalah film, pertunjukan slaid, pita video, dan disk video;
- (4) Dokumen bersifat material seperti objek, sampel, mock-up, karya artistik, monumen, buku braille, dan mainan pengajaran.

Dokumen campuran merupakan dokumen yang menggabungkan dokumen tekstual dan non-tekstual menjadi satu dalam membahas sebuah subjek, misalnya buku dan kaset (seperti buku pelajaran bahasa), atau mainan pendidikan (*educational kit*). Dokumen magnetik untuk pengolahan komputer, misalnya program yang memungkinkan melaksanakan tugas kalkulasi, pemilahan, simulasi, dan pengolahan, serta berkas (*file*).

Material adalah wadah fisik dokumen. Sifat dokumen tidak harus selalu sama dengan material dokumen, misalnya sebuah dokumen dengan sifat ikonik seperti foto dapat berada dalam 2 jenis wahana yaitu film negatif dan hasil cuciannya. Materi tradisional semacam batu, tanah liat, kayu, dan tekstil secara berangsur-angsur digantikan oleh kertas. Hingga kini kertas merupakan

wahana yang lazim dalam kaitannya dengan dokumen. Dengan berkembangnya teknologi, kedudukan kertas mulai disaingi oleh disket plastik atau perangkat teknologi non kertas lainnya.

#### **D. Arsip**

Terdapat 2 (dua) bahasa yang menjadi akar dari istilah arsip, latin dengan kata “archivum” dan Yunani dengan kata “archeon”. Kedua kata itu mengandung 2 (dua) istilah, yakni gedung pemerintahan dan catatan-catatan penting yang disimpan didalamnya. Istilah arsip lantas berkembang, dalam konteks negara Anglo Saxon misalnya, terdapat 2 (dua) kata yang merujuk pada “arsip” yakni *records* (rekod) dan *archives* (Arsip). Rekod adalah arsip yang masih digunakan dalam proses administrasi dan transaksi suatu organisasi. Rekod ini juga disebut sebagai arsip dinamis. Sementara Arsip merupakan rekod yang memiliki nilai guna berkelanjutan dan tidak lagi digunakan dalam proses administrasi ataupun transaksi dengan istilah lainnya arsip seperti ini disebut juga arsip statis.

Dalam konsepsi Bradsher (1998:3), arsip adalah dokumen-dokumen pemerintahan, masyarakat, ataupun perorangan dengan tidak melihat waktu dan bentuk arsip tersebut, yang tidak digunakan lagi untuk keperluan bisnis tetapi dipertahankan keberadaannya untuk pembuktian suatu kegiatan atau karena informasi yang dimilikinya, baik itu yang sudah ataupun belum diserahkan kepada institusi kearsipan. Informasi arsip merupakan nilai dasar dan nilai keberlanjutan yang ditujukan untuk keperluan administrasi, keuangan, hukum, pembuktian dan sejarah.

Dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Tampak jelas bahwa konstruksi definisi arsip dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan memuat pokok pikiran yang diajukan oleh Bradsher. Lebih lanjut Bradsher juga menjelaskan, bahwa arsip bukan hanya yang disimpan dan diserahkan kepada institusi kearsipan, tetapi untuk setiap dokumen yang dimiliki dan disimpan oleh perorangan atau organisasi.

Masih menurut Bradsher (1988:6) arsip memiliki karakteristik yang membedakan dengan sumber-sumber informasi yang lain, yaitu:

1. Adanya keterkaitan antara arsip dengan penciptanya. Arsip yang lahir secara khusus dikumpulkan sebagai akibat langsung dari aktivitas suatu organisasi dan sebagai gambaran dari kebijakan, fungsi dan transaksi yang ada;
2. Karakteristik yang kedua dari arsip adalah suatu bagian yang saling berhubungan atau dengan yang lainnya;
3. Arsip merupakan hasil samping kegiatan transaksi dari suatu organisasi yang memiliki efek legalitas, sehingga dikatakan salah satu karakteristik arsip adalah arsip yang memiliki sifat “resmi”;
4. Karakteristik yang lain adalah arsip bersifat unik, yaitu arsip diciptakan secara tunggal atau satu-satunya.

Dengan segala karakteristiknya itu, McKemmish (1998:8) merumuskan pentingnya arsip untuk diperlihara dan dijaga dengan alasan sebagai berikut:

1. Pusat ingatan berjangka panjang, dalam perencanaan, pengambilan keputusan, ilmu pengetahuan, dan kebenaran sejarah;
2. Cara untuk menambah pengalaman dari yang lainnya;
3. Pembuktian hak dan kewajiban;
4. Alat kekuasaan, legitimasi dan akuntabilitas, serta sarana untuk melakukan hubungan sosial;
5. Alat untuk memahami dan mengidentifikasi diri sendiri, organisasi dan masyarakat;
6. Sarana komunikasi di bidang politik, sosial dan budaya.

Dari segi kegunaannya awalnya arsip ini dimaksudkan untuk kepentingan praktis pemerintah sendiri, akan tetapi di kemudian hari bahan-bahan itu berguna bagi penelitian, didalamnya direkam kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemerintahan. Dengan

pertimbangan bahwa arsip diciptakan dalam suasana zaman, dekat dengan keadaan dan kejadiannya sehingga mengandung subyektivitas yang relatif kecil, maka arsip merupakan “*first-hand knowledge*” yang kredibilitasnya dapat diandalkan (Soeri Soeroto, 1980:67).

## **E. Museum**

Museum menurut *International Council of Museums* (2007) adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan dan kenyamanan. Dari pengertian ini, Ardiwidjaja (2009) menjelaskan bahwa museum memiliki fungsi strategis terhadap penguatan identitas kebangsaan pada masyarakat.

Menurut seorang tokoh Museologi Amerika, A.C Parker, museum dalam konteks dunia modern adalah suatu lembaga yang secara aktif melakukan tugasnya didalam hal menerangkan dunia manusia dan alam (Moh. Amir Sutaarga: 1982). Ditegaskan kembali oleh Sir John Forsdyke, bahwa tugas museum yang pertama ialah memelihara kenyataan, dengan perkataan lain, memamerkan kebenaran benda-benda, selama kebenaran itu tergantung dari bukti-bukti yang berupa benda (1982).

Dengan bahasa berbeda namun mengandung nilai yang sama, Kartiwa (2009) menyatakan bahwa museum memiliki fungsi strategis dalam bidang sejarah dan budaya. Museum menampilkan cuplikan potongan sejarah dan budaya sehingga masyarakat dapat melihat langsung representasi tersebut. Museum dapat memberikan informasi tentang aspek kehidupan masa lampau yang masih bisa diselamatkan sebagai warisan budaya untuk menjadi bagian dari jati diri suatu bangsa.

Merangkum semua, Gertrud Rudloff-Hille menjelaskan arti dan tugas museum, menurutnya arti dan tugas museum adalah sebagai berikut: (a) Museum bukan saja mengumpulkan barang-barang antik atau barang-barang bagi penyelidikan ilmu pengetahuan, tetapi barang-barang itu adalah warisan kebudayaan dan segala hubungannya harus dipamerkan kepada umum; (b)

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Museum bukan tempat atau ruangan-ruangan untuk kepentingan para peminat atau kaum sarjana saja, iapun harus terbuka bagi dan dapat menambah pengetahuan semua orang teristimewa para pemuda.

Secara legal formal, sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (Pasal 1 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.33/PL.303/MKP/2004).

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.33/PL.303/MKP/2004, museum dibedakan berdasarkan koleksi yang disimpan menjadi museum umum dan museum khusus. Museum umum ciri koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material hasil budaya manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. Contoh museum umum adalah Museum Nasional di Jakarta yang koleksinya mencakup kekayaan budaya dari seluruh pelosok Indonesia. Museum khusus ciri koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material hasil budaya manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi. Contoh Museum IPTEK, Museum Serangga dan Kupu-Kupu, Museum Reptil, Museum Air Tawar, dan berbagai museum lainnya di Taman Mini Indonesia Indah yang koleksinya terbatas pada tema tertentu. Selain itu ada contoh lain yang lebih khusus misalnya Museum Sasmitaloka Achmad Yani di Jakarta. Museum ini merupakan museum memorial, yang mengkhususkan dirinya pada preservasi dan presentasi benda-benda yang berkaitan erat dengan peristiwa tragis G 30 S/PKI terhadap almarhum Jenderal Achmad Yani. Contoh lainnya, Museum Kirti Griya Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta yang secara tipologis merupakan suatu museum memorial dan berkaitan erat dengan riwayat hidup almarhum Ki Hadjar Dewantara. Mulai dari pekarangan rumah kediaman sampai kepada setiap benda yang ada di dalam rumah, dibiarkan terpelihara dan tersajikan sebagaimana adanya untuk mengenang almarhum Ki Hajar Dewantara.

Peran museum sebagaimana merujuk pada Ardiwidjaja (2009) dapat disarikan dalam 9 (sembilan) point:



# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

1. *Visitor attraction*  
Museum memberikan gambaran tentang suatu daerah pada pengunjung atau turis;
2. *Catalyst for change*  
Dalam museum tersirat pesan yang mengajak masyarakat untuk berpikir mengenai posisi dan hubungannya dengan dunia luar;
3. *Center of creativity*  
Museum membuat pengunjungnya melakukan kegiatan dan berpikir, sehingga outcome dari sebuah kunjungan museum bergantung pada tiap individu pengunjung;
4. *Memory bank*  
Museum menyajikan berbagai aspek sejarah, kebudayaan, tokoh penting, dan sebagainya;
5. *Story-teller*  
Museum memberikan interpretasi aspek sejarah dan budaya yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan;
6. *Attic*  
Museum melakukan upaya preservasi terhadap objek sejarah;
7. *Treasure trove*  
Museum melakukan upaya preservasi terhadap objek berharga dan langka;
8. *Shrine/hall of fame*  
Museum menceritakan pencapaian sekelompok orang atau individu dengan asumsi pengunjung akan menjadi tertarik dengan topik yang disajikan;
9. *Exclusive club*  
Meskipun terbuka untuk umum, museum merupakan tempat yang khusus bagi individu yang memiliki special interest dan pengetahuan terhadap koleksi museum tersebut. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, museum harus dilengkapi dengan perangkat yang dapat menyokong dan memberi jaminan untuk kelangsungan pekerjaannya. Kelengkapan itu antara lain (op cit: 1982):
  - a. Museum harus mempunyai ruangan kerja bagi para konservator, dibantu oleh perpustakaan dan staf administrasi;

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

- b. Museum harus mempunyai ruangan-ruangan untuk koleksi penyelidikan (*reference collection*) yang disusun menurut sistem dan metode yang khas bagi ilmu yang mencakup koleksi itu;
- c. Museum harus mempunyai ruangan-ruangan untuk pameran tetap (*permanent exhibition*) yang dapat memberi kemungkinan-kemungkinan untuk cara-cara pameran yang instruktif, fungsional dan dapat memenuhi syarat-syarat keindahan yang diperlukan, sehingga setiap benda dapat ditempatkan menurut arti dan fungsinya;
- d. Museum harus mempunyai ruangan-ruangan untuk pameran sewaktu-waktu (*temporary exhibition*), yang sifatnya lebih khusus, tetapi lebih jelas dan sedapat mungkin diselenggarakan secara konstruktif, sehingga terasa benar manfaatnya bagi pendidikan masyarakat;
- e. Museum harus dilengkapi dengan suatu laboratorium yang berkewajiban mencari cara-cara merawat atau mengawetkan barang-barang koleksinya, menghindarkannya dari bahaya serangga, bahaya udara lembab dan bahaya-bahaya kehancuran lainnya;
- f. Museum harus mempunyai studio dengan perlengkapan pemotretan dan pembuatan alat-alat audio visual lainnya, studio untuk membuat reproduksi barang-barang koleksi atau untuk membetulkan barang-barang koleksi yang rusak;
- g. Museum harus mempunyai ruangan-ruangan untuk bagian penerangan dan pendidikan, yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi para anggota staf ilmiah yang ditugaskan untuk menyusun acara-acara kunjungan, ceramah dan film, ruangan-ruangan untuk menggambar dan pekerjaan tangan lainnya, demonstrasi musik, tari dan lain-lain, baik bagi para pelajar sekolah, mahasiswa, maupun bagi rombongan anggota perkumpulan;
- h. Perpustakaan museum harus dilengkapi dengan perlengkapan audio visual, berupa *slide*, film dan alat-alat penyimpan suara dan sebagainya;
- i. Museum harus dapat memberikan tempat penikmatan seni (galeri), penyaluran ilmu pengetahuan dan apabila museum itu ditempatkan ditengah taman luas, menghijau penuh tetumbuhan yang diatur secara seni, yang didalamnya ada tempat-tempat untuk pesta rakyat, seperti

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

halnya di beberapa museum *folklore* di Skandinavia, maka museum dan lingkungannya itu dapat disebut pusat kebudayaan dalam arti yang sebenarnya;

- j. Museum yang besar koleksinya harus sanggup menyelenggarakan pameran-pameran keliling.

Setelah membahas definisi dan kelengkapan yang diperlukan sebuah museum maka akan dijelaskan lebih lanjut perihal persyaratan berdirinya suatu museum, cara merencanakan pendirian museum, pelaksanaan pendirian museum dan permohonan izin. Adapun persyaratan berdirinya sebuah museum adalah:

1. Lokasi museum

Lokasi harus strategis dan sehat (tidak terpolusi, bukan daerah yang berlumpur/tanah rawa);

2. Bangunan museum

Bangunan museum dapat berupa bangunan baru atau memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi, agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan museum minimal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu bangunan pokok (pameran tetap, pameran temporer, auditorium, kantor, laboratorium konservasi, perpustakaan, bengkel preparasi, dan ruang penyimpanan koleksi) dan bangunan penunjang (pos keamanan, museum shop, tiket box, toilet, lobby, dan tempat parkir);

3. Koleksi

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rohnyanya sebuah museum, maka koleksi harus: (a) mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah (termasuk nilai estetika); (b) harus diterangkan asal-usulnya secara historis, geografis dan fungsinya; (c) harus dapat dijadikan monumen jika benda tersebut berbentuk bangunan yang berarti juga mengandung nilai sejarah; (d) dapat diidentifikasi mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, genus (untuk biologis), atau periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam); (e) harus dapat dijadikan dokumen, apabila benda itu berbentuk dokumen dan dapat dijadikan bukti bagi penelitian ilmiah; (f) harus merupakan benda yang asli, bukan tiruan; (g)

harus merupakan benda yang memiliki nilai keindahan (*master piece*); dan  
(h) harus merupakan benda yang unik, yaitu tidak ada duanya;

4. Peralatan museum

Museum harus memiliki sarana dan prasarana museum berkaitan erat dengan kegiatan pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi (AC, dehumidifier, dll.), pengamanan (CCTV, alarm system, dll.), lampu, label, dan lain-lain;

5. Organisasi dan ketenagaan

Pendirian museum sebaiknya ditetapkan secara hukum. Museum harus memiliki organisasi dan ketenagaan di museum, yang sekurang-kurangnya terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi (kurator), bagian konservasi (perawatan), bagian penyajian (preparasi), bagian pelayanan masyarakat dan bimbingan edukasi, serta pengelola perpustakaan;

6. Sumber dana tetap

Museum harus memiliki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Pendirian museum harus memiliki tujuan yang jelas, dan juga harus memiliki perencanaan (*master plan*) yang matang. Perencanaan pendirian museum harus menjelaskan tentang:

1. Jenis museum

Jenis museum harus ditentukan terlebih dahulu, karena menyangkut tindakan selanjutnya, baik bangunan maupun koleksi yang akan diadakan serta kebijakan lainnya;

2. Koleksi

Perlu merencanakan koleksi-koleksi yang akan diadakan, dan harus juga melakukan pembatasan atau seleksi sesuai dengan tujuan dan kemampuan biaya yang tersedia. Perlu diketahui bahwa koleksi museum selain diadakan secara pembelian (imbalan jasa), dapat juga diadakan dari hibah atau pemberian, dan tukar-menukar;

3. Lokasi

Lokasi yang dipilih bukan untuk kepentingan pendirinya, tetapi untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ilmuwan, wisatawan, dan masyarakat umum lainnya;

4. Bangunan

Bangunan museum harus berdasarkan persyaratan tertentu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti bentuk bangunan, bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang akan dibangun, luas bangunan, dan bahan-bahan yang digunakan;

5. Peralatan

Perlu direncanakan jenis-jenis peralatan yang akan diadakan, baik peralatan teknis (pameran, pemberian informasi, perawatan, dan kegiatan kuratorial), maupun peralatan kantor;

6. Ketenagaan

Faktor ketenagaan merupakan hal penting dari suatu organisasi. Rencana pengadaan tenaga harus ditangani secara baik, museum harus memilih tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan menguasai masalah teknis permuseuman dan ilmu yang menunjang, dan tenaga manajerial.

Setelah disusun perencanaan, maka dilanjutkan dengan perizinan. Dalam melaksanakan pendirian museum terlebih dahulu harus ada izin yang berwenang, sesuai peraturan Pemerintah tentang permuseuman. Selain itu juga ada izin penting:

1. Izin penggunaan tanah untuk bangunan museum, untuk memperoleh hak atas status tanah harus diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (sertifikat). Untuk memperoleh izin peruntukan lokasi bangunan museum harus diajukan ke Dinas Tata Kota (*advice planning* – rencana tata kota);
2. Izin mendirikan bangunan, diajukan kepada Dinas Pengawasan Pembangunan sampai memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setelah memperoleh berbagai izin penting, pendirian sebuah museum memasuki tahap berikutnya, yaitu:

1. Mendirikan bangunan

Setelah memperoleh IMB dari Dinas Pengawasan Pembangunan, maka didirikanlah museum tersebut sesuai dengan rencana (master plan) yang

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

telah ada, yaitu: lokasi, bentuk bangunan, bahan bangunan dan sebagainya. Apabila biaya terbatas pendirian ini dapat dilaksanakan secara bertahap dengan sistem skala prioritas;

## 2. Persiapan Ketenagaan

Sambil mendirikan bangunan museum, harus pula mempersiapkan tenaga-tenaga ahli atau tenaga pengelola yang sesuai dengan keperluan. Disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan formal yang diperlukan, tenaga-tenaga perlu untuk diberikan pengetahuan mengenai ilmu permuseuman dan soal-soal teknis permuseuman, melalui pendidikan dan pelatihan atau magang di museum yang telah dikelola dengan baik. Sebaiknya tenaga yang dipilih adalah tenaga yang siap pakai untuk bekerja di museum;

## 3. Pengadaan koleksi

Dalam mengadakan koleksi museum sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan persyaratan, sebaiknya diadakan terlebih dahulu sesuai untuk mendukung sistematika pameran. Koleksi yang diadakan harus betul-betul koleksi yang diperlukan dan tidak asal diadakan saja.

Setiap instansi Pemerintah, yayasan, atau badan usaha yang akan mendirikan museum wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang permuseuman. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan proposal yang memuat: (1) tujuan pendirian museum; (2) data koleksi sesuai dengan tujuan pendirian museum; (3) rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang; (4) gambar situasi bangunan museum, harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, dan ruang administrasi, serta peralatan museum; (5) keterangan status tanah hak milik atau sekurang-kurangnya berstatus hak guna bangunan (HGB) dan izin mendirikan bangunan (IMB); (6) keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis; dan (7) keterangan sumber pendanaan tetap.

Dalam penelitian ini, museum dirujuk guna mengkonsepsikan memorial presiden. Sebagaimana dijelaskan diatas, memorial merupakan jenis khusus museum yang diperuntukkan guna mengenang sesuatu peristiwa atau tokoh

tertentu. Memorial presiden berarti museum yang diperuntukkan untuk mengenang para presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia. Memorial presiden nantinya akan menggambarkan riwayat hidup masing-masing presiden itu.

## **F. Lembaga Kearsipan**

Lembaga kearsipan seperti halnya sebuah organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Menentukan program kearsipan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan lembaga kearsipan. Ada beberapa aspek yang cukup penting dalam mengelola suatu lembaga kearsipan. Secara gamblang, Cox (1992:31) menyatakan bahwa hal-hal berikut ini merupakan elemen yang penting dalam mengelola lembaga kearsipan yaitu:

- a. Misi dari lembaga;
- b. Sumber keuangan yang memadai;
- c. Prosedur kearsipan;
- d. Tenaga kearsipan yang profesional;
- e. Keberhasilan program kearsipan dari suatu lembaga tergantung pada tenaga pelaksanaannya;
- f. Penyediaan fasilitas penyimpanan dan penggunaan arsip;
- g. Program kerjasama di bidang kearsipan.

Menurut Cox (1992: 139-147) terdapat beberapa elemen dasar yang harus dimiliki oleh lembaga kearsipan dalam hubungannya dengan layanan.

1. Penyediaan fasilitas layanan yang cocok dan memadai, meliputi sarana fisik seperti meha, kursi, penerangan yang cukup dan juga kemudahan akses terhadap arsip melalui *findings aids*, kamus, ensiklopedia serta kemudahan hubungan dengan bagian penyimpanan;
2. Lembaga kearsipan sebaiknya mengelola dan mencatat segala sesuatu yang menyangkut permohonan penelitian;
3. Lembaga kearsipan perlu mengadakan wawancara dengan peneliti mengenai segala sesuatu yang akan dicari;
4. Lembaga kearsipan seyogyanya menjalankan kebijakan untuk menangani permintaan yang bukan bersifat kunjungan;

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

5. Lembaga kearsipan harus mendukung layanan reprografi atau permintaan penggandaan;
6. Lembaga kearsipan berkepentingan dengan kelangsungan program yang ia miliki dalam fungsinya sehari-hari terhadap organisasi induk, bidang pelayanan harus dilihat sebagai bagian yang mengkaji penggunaan informasi sebagai suatu hasil dan mempunyai peranan yang potensial.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan:

- a) ANRI yang merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara;
- b) Arsip daerah provinsi yang merupakan lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi
- c) Arsip daerah kabupaten/kota yang merupakan lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;
- d) Arsip perguruan tinggi yang merupakan lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi.



### **BAB III**

## **M E T O D O L O G I P E N E L I T I A N**

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisa data, dan validitas dan reabilitas penelitian kualitatif.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian Kajian Memorial Presiden dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya yang diteliti (Sugiyono; 2008,4). Berdasarkan tujuan, penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi penelitian pengembangan (*research and development*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, dalam hal ini adalah memorial presiden. Sementara berdasarkan tingkat kealamiahannya tempat penelitian, metode penelitian ini menggunakan metode naturalistik untuk meneliti suatu tempat yang alamiah dan peneliti hanya mengumpulkan data secara *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan terhadap sejumlah bangunan memorial yang terdapat di Malaysia dan Thailand, dan beberapa memorial dan museum yang diakses melalui internet. Selain itu, bangunan sejenis memorial seperti museum yang terdapat di Indonesia (8 museum/monumen). Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan museum/memorial, yang meliputi aspek kelembagaan, objek/materi arsip, sistem pengelolaan, prasarana dan sarana, SDM, dan akses publik yang terdapat pada memorial.

#### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati/diobservasi (Cholid Norbuko, 2008;

12). Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel memorial presiden.

1. Kelembagaan Memorial

Keseluruhan organisasi yang terdapat dalam memorial presiden, yang bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dalam memorial presiden;

2. Objek/Materi Memorial

Materi yang menjadi koleksi yang terdapat dalam memorial presiden, termasuk materi yang berjenis arsip/dokumen;

3. Sistem Pengelolaan Memorial

Proses pengendalian koleksi yang dilakukan memorial presiden, yang diselenggarakan secara efisien, efektif, dan sistematis;

4. Prasarana dan Sarana Memorial

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pendukung untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembangunan memorial presiden. Prasarana merupakan infrastruktur yang merupakan komponen pendukung memorial presiden, seperti gedung, ruang simpan dan lain-lain, sedangkan sarana adalah peralatan digunakan untuk pendukung terlaksananya proses kegiatan pengelolaan koleksi, seperti lemari, rak, dan sejenisnya;

5. SDM Memorial

Tenaga pengelola yang terdapat di memorial presiden, yang memiliki kompetensi dan profesional didalam mengelola memorial presiden;

6. Akses Publik Memorial

Ketersediaan informasi yang dimiliki oleh memorial presiden kepada publik.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dan melalui dokumen tertulis kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono (2008; 224), observasi dapat dilihat dari berbagai sumber dan dari segi caranya. Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi pengamatan secara langsung (*participant observation*) dengan bentuk partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di lokasi

yang diamati tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, dan partisipasi moderat, dimana dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar.

Observasi juga dilakukan secara terus terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang tentang maksud dan tujuan kepada sumber data, namun ada suatu saat peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi guna menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang bersifat rahasia. Observasi juga dilakukan secara tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas, fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

Selain observasi juga dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*). Peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi instrumen hanya berupa rambu-rambu dalam pengamatan. Teknik lain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi.

# Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

**Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Kriteria Sumber Data	Cakupan
Primer	Observasi	Kelembagaan	Struktur organisasi
		Objek/materi (arsip)	- Riwayat - Penghargaan - Dokumen kebijakan
		Sistem pengelolaan arsip	-Akuisisi -Pengolahan -Pemeliharaan -Penyajian
		Prasarana & Sarana	-Gedung -Penggunaan teknologi -Peralatan penyajian
		SDM	-Pemeliharaan -Kompetensi pemandu
		Akses Publik	-Kemudahan akses -Kepuasan publik
	Interview	Kelembagaan	Fungsi & Tugas
		Objek/materi (arsip)	- Riwayat - Penghargaan - Dokumen kebijakan
		Sistem pengelolaan arsip	-Akuisisi -Pengolahan -Pemeliharaan -Penyajian
		Prasarana & Sarana	-Gedung -Penggunaan teknologi -Peralatan penyajian
		SDM	-Pemeliharaan -Kompetensi pemandu
		Akses Publik	-Kemudahan akses -Kepuasan publik
	Dokumentasi	Kelembagaan	-Sejarah
		Objek/materi	-Jenis dan nama arsip
		Akses Publik	-Jumlah pengunjung

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti (Lincoln and Guba, 1989; 37). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 'divalidasi' seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian terjun ke lapangan, *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan. Instrumen kisi-kisi wawancara hanya digunakan sebagai rambu dalam melakukan pengamatan, yang meliputi aspek kelembagaan, objek/materi, sistem pengelolaan, prasarana dan sarana, SDM, dan akses publik.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, maupun pada saat dilapangan atau pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, disebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (2008; 246). Adapun aktivitas yang dilakukan saat menganalisis data kualitatif adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Reduksi data dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok atau penting sesuai aspek yang ditetapkan sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas. Sedangkan data display atau penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya, maupun uraian teks yang bersifat naratif.

Kemudian pada *conclusion drawing/verification* adalah berupa penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga suatu kesimpulan yang kredibel.

## **G. Validasi Data**

Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah validasi data. Validasi data merupakan mekanisme melalui mana data yang didapat terjamin keabsahan atau tidaknya. Dalam tradisi kualitatif validnya data dilihat pada sejauhmana kebenaran yang ditampilkan mencerminkan kebenaran intersubyektif. Teknik yang digunakan dalam validasi data adalah triangulasi. Asumsi dari triangulasi adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan jauh lebih akurat apabila juga digunakan interview atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh melalui kedua metode tersebut (Burhan Bungin: 2003). Begitu juga dengan hasil-hasil analisa yang dilakukan peneliti akan lebih akurat apabila diuji keabsahan melalui uji silang dengan informan lain, termasuk dengan informan penelitian.

Secara umum, teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganekaragamkan teknik pengumpulan data dan informasi, sehingga hasil yang diperoleh oleh masing-masing teknik dapat saling melengkapi dan saling mengklarifikasi satu sama lain. Disinilah, selain melakukan wawancara mendalam, peneliti juga melakukan wawancara samil lalu, observasi dan juga penelusuran data sekunder. Secara teknik triangulasi dilakukan pengumpulan data melalui *cross check* silang antar teknik pengumpulan data. Disinilah peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data temuan observasi dan penelusuran data sekunder lainnya. Dari sini lantas peneliti mencari keragaman dan persamaan dari data-data tersebut.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi di lapangan terkait dengan perumusan masalah yang diteliti, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana ANRI mempersiapkan pengelolaan memorial presiden, sebagai tinjauan pembangunan memorial presiden di Indonesia.

Namun sebelumnya akan ditampilkan deskripsi penyelenggaraan memorial pimpinan negara yang terdapat di beberapa negara lain, yaitu Malaysia dan Thailand, termasuk model memorial yang terdapat di Indonesia. Deskripsi ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kajian memorial yang meliputi: aspek kelembagaan, aspek objek/materi, aspek sistem pengelolaan arsip, aspek prasarana dan sarana, aspek SDM, dan aspek akses publik dalam memorial.

#### **A. Deskripsi Penyelenggaraan Memorial Pemimpin Negara di Beberapa Negara**

Dalam kajian memorial presiden, penelitian mengambil lokasi di Malaysia dan Thailand. Kedua negara ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki banyak bangunan memorial mengenai pemimpin negara sehingga memudahkan dalam membantu penyusunan kajian memorial. Meskipun memiliki perbedaan sistem pemerintahan dengan Indonesia, namun kedua negara ini mempunyai kebudayaan dan karakteristik masyarakatnya yang hampir serupa dengan Indonesia sehingga keberadaan memorial sebagai representasi para pemimpin negara setidaknya memperoleh apresiasi yang sama dari masyarakatnya.

Selain itu, Malaysia dan Thailand dari segi jarak tempuh tidaklah terlalu jauh dengan Indonesia sehingga pertimbangan efisiensi dan efektivitas menjadi prioritas dalam penentuan lokasi kajian. Keberadaan memorial juga sebagian besar sudah dipublikasikan di media cetak dan

media elektronik sehingga beberapa materi memorial yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini tersaji secara lengkap.

### **1. Malaysia**

Malaysia merupakan suatu negara yang menganut sistem parlementer sejak merdeka pada tahun 1957. Sampai dengan saat ini suksesi kepemimpinan pemerintahan telah memiliki 6 (enam) perdana menteri. Setiap pasca kepemimpinan perdana menteri telah dibangun memorial mengenai profil negarawan seorang perdana menteri ketika yang bersangkutan menempati rumah dinas perdana menteri. Pendirian memorial bertujuan untuk mengenang para jasa negarawan, khususnya para mantan perdana menteri. Adanya memorial diharapkan generasi penerus dapat menghargai hasil perjuangan dan kepemimpinan negarawan dengan melihat sisi kehidupan negarawan selama menjabat sebagai perdana menteri.

Saat ini Malaysia mempunyai 4 (empat) memorial mengenai sosok negarawan mantan perdana menteri dan semuanya berlokasi di Kuala Lumpur-Malaysia, yaitu *Tunku Abdul Rahman Putra Memorial*, *Tun Abdul Razak Memorial*, *Tun Hussein Onn Memorial*, dan *Galleria Seri Perdana* (representasi dari Mahathir Mohammad). Selain memorial mengenai sosok perdana menteri, memorial juga diperuntukkan untuk seorang wakil perdana menteri *Tun Abdul Gaffar Baba Memorial*, serta yang berjasa di bidang seni dan budaya, yaitu *P. Ramlee Memorial*.





Gambar 4.1. P. Ramlee Memorial,  
satu-satunya memorial yang bukan mantan perdana menteri

Ada juga bangunan memorial yang tidak menceritakan profil seseorang pemimpin atau tokoh, memorial ini menceritakan tentang pengorbanan para negarawan pejuang kebebasan dan kemerdekaan tanah air dari penjajah, memorial ini bernama *Proclamation of Independence Memorial* yang berlokasi di Melaka.



Gambar 4.2. Proclamation of Independence Memorial di Melaka

Masing-masing memorial mengenai negarawan mantan perdana menteri tersebut menampilkan rekam jejak yang mengetengahkan bentuk perjuangan kepemimpinan yang diwariskan kepada generasi penerus sehingga melahirkan sebutan 'khusus' bagi masyarakatnya terhadap masing-masing memorial, antara lain: (1) *Tunku Abdul Rahman Putra Memorial* sebagai Bapak Kemerdekaan; (2) *Tun Abdul Razak Memorial* sebagai Bapak Pembangunan; dan (3) *Tun Hussein Onn Memorial* sebagai Bapak Pemersatu; serta (4) *Tun DR. Mahathir Mohammad* dengan *Galleria Seri Perdana* sebagai Bapak Pemodeleran.

*Galleria Seri Perdana* merupakan representasi Mahathir Mohammad tidak menggunakan istilah memorial sebagaimana hal yang lain, karena koleksi yang ditampilkan tidak hanya dalam suatu gedung/bangunan tertutup tetapi juga memamerkan keberadaan taman disekitarnya yang luas sehingga dapat dinikmati tidak hanya untuk pengetahuan tetapi juga kalangan pencinta

seni. Sebagai galleria, tempat tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat pesta atau jamuan kenegaraan.

Istilah memorial lebih dikhususkan untuk sosok pemimpin individu/perorang atau kelompok, berbeda dengan istilah museum yang lebih kepada benda sebagai objek yang terdapat dalam suatu bangunan untuk dipamerkan kepada masyarakat.



Gambar 4.3. Tunku Abdul Rahman Putra Memorial

Adapun hasil kajian dan aspek-aspek dalam memorial di Malaysia adalah sebagai berikut:

a. Aspek kelembagaan

Pengelolaan memorial dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah Arkib Negara Malaysia (ANM) yang berada dibawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (2011) sebelumnya bernama Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan/KKKW (2008). ANM selaku lembaga pemerintah dalam melaksanakan tujuan

lembaga berdasarkan Akta 629 Tahun 2003 tentang Arkib Negara. Keberadaan ANM berawal dari dibentuknya *Public Records Office* yang dipimpin oleh Tuan Haji Mubin Sheppard, yang terbentuk sejak tanggal 1 Desember 1957. Tahun 1963 lembaganya berganti nama menjadi ANM yang langsung dipimpin oleh Dr.FRJ. Verhoeven (pakar arkib dari UNESCO).

Bangunan memorial mulai terbentuk pada tanggal 6 Mei 1982 saat berdirinya Bangunan Sri Taman sebagai cikal bakal berdirinya *Tun Abdul Razak Memorial*. Kemudian diikuti oleh pembangunan memorial *Proclamation of Independence Memorial* yang berlokasi di Melaka, yang diresmikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra. Selanjutnya *Tunku Abdul Rahman Putra Memorial* (berdiri tanggal 10 November 1994), *Tun Hussein Onn Memorial* (tanggal 10 Februari 2006), dan *Galleria Seri Perdana* (tanggal 20 Desember 2003).



Gambar 4.4. Tun Abdul Razak Memorial

Dalam struktur organisasi ANM (2010), keberadaan memorial dibawah *Deputi Research and Outreach*, yaitu *Statesmen Archives Division* atau Bagian Arkib Negarawan. *Statesmen Archives Division* ini

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

mempunyai tanggungjawab mengelola dan memelihara arkib-arkib negarawan dan memorial, termasuk *P. Ramlee Memorial* dan *Civil Service Gallery*.

*Deputi Research and Outreach* mempunyai tugas pokok memelihara bahan arkib (istilah untuk arsip statis) sebagai warisan negara, memperluas penyebaran dan penggunaan bahan arkib melalui penggunaan teknologi terkini, pameran, penerbitan dan sebagainya, serta meningkatkan jumlah pelawat ke ANM dan memorial melalui program dan aktivitas yang terancang. Hal ini sejalan dengan visi ANM, '*to become an outstanding national centre for archives and archival research*' – menjadi pusat arkib dan penelitian negara yang unggul. Pada Divisi Arkib Negarawan terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Manajemen Arkib Negarawan dan Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Arkib Negarawan. Kedua seksi tersebut mempunyai tanggungjawab dalam mengelola dan memelihara bangunan memorial, kemudian pada setiap memorial dipimpin oleh kepala unit dibawah Seksi Manajemen Arkib Negarawan.

Keberadaan memorial dibawah *Deputi Research and Outreach ANM*, memperlihatkan bahwa memorial sebagai suatu tempat yang berfungsi untuk sumber penelitian mengenai tokoh negarawan sekaligus meningkatkan kesadaran warga negaranya terhadap sejarah negara melalui penggunaan bahan arkib dan peninggalan-peninggalan yang dimiliki negarawan. Pada divisi ini, mengkhususkan pekerjaannya terhadap arkib milik negarawan, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terhadap perolehan arsip statis dan benda-benda peninggalan yang dimiliki dan pernah dipakai oleh negarawan.

Secara kelembagaan, unit memorial mempunyai hubungan organik dengan ANM dalam hal memberikan penerangan dan mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan arkib negarawan kepada publik, tanpa harus langsung menjadi bagian instansi vertikal dari Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK). Sementara museum yang objek materinya bukan berupa fisik arsip yang memperlihatkan individual seorang negarawan dikelola langsung oleh KPKK dan bukan dibawah naungan ANM.

Pengelompokkan antara memorial dan museum ini menunjukkan adanya lembaga yang berbeda dalam pengelolaannya. Memorial meskipun berlokasi di negara bagian, tetaplah pengelolaannya menjadi tanggung jawab ANM melalui Divisi Arkib Negarawan, dan ini berbeda dengan museum yang pengelolaannya menjadi milik masing-masing negara bagian sesuai dengan lokasi museum. Rentang pengendalian antara memorial dengan ANM bukanlah kendala, hal ini dikarenakan memorial yang berada di negara bagian itu pada umumnya mempunyai koleksi arkib dan benda-benda peninggalan yang sejak awal tersedia dan terdapat di negara bagian tersebut.

Dengan kata lain secara organisatoris kelembagaan, pengelolaan memorial dilakukan secara sentralisasi oleh Divisi Arkib Negarawan, *Deputi Research and Outreach* dan bertanggung jawab kepada ANM, dibawah naungan KPKK.

b. Aspek objek/materi

Masing-masing negarawan memiliki kekhas-an objek tersendiri. Ambil contoh: *Proclamation of Independence Memorial* yang mengutamakan kisah sejarah perjuangan kemerdekaan dalam pelbagai bahan, seperti dokumen, foto, cenderamata, maupun benda-benda perjuangan yang digunakan ketikas masa perjuangan. Di dalam memorial juga tersedia ruang audio visual untuk pemutaran film sejarah perjuangan dan kemerdekaan Malaysia. Ada juga foto-foto Yang Di Pertoean Agoeng sejak Malaysia merdeka hingga sekarang. Sementara pada *Tunku Abdul Rahman Putra Memorial* dan *Tun Abdul Razak Memorial* lebih mengutamakan terhadap benda-benda peninggalan ketika mereka menjabat sebagai perdana menteri, oleh karenanya pembagian ruang memorial lebih kepada situasi ruang rumah dinas, termasuk ruang tempat perdana menteri bekerja. Ada juga prasasti yang berisikan perjuangan bangsa melayu dan Malaysia.

*Tun Hussein Onn Memorial* memiliki objek yang berbeda dengan memorial lain, koleksi memorialnya terintegrasi dan benar-benar menampilkan khazanah arsip dalam semua bentuk media, termasuk klipping koran mengenai kegiatan Tun Hussein Onn dalam pemerintahan

dan juga kehidupan keluarganya. Pembagian ruangan memorial berdasarkan periode saat beliau mulai menjadi menteri pelajaran, timbalan/ wakil perdana menteri dan perdana menteri, dan juga ketika pasca menjabat perdana menteri.



Gambar 4.5. Tun Hussein Onn Memorial

Ada juga silsilah keluarga Tun Hussein Onn yang memperlihatkan darah nasionalismenya, dimana anggota keluarganya juga berperan aktif dalam pemerintahan sebagai menteri besar di Johor. Begitupun perjalanan hidupnya sejak mulai kecil, saat masih sekolah, hingga saat bekerja sebagai menteri, termasuk peran dan kehidupan asmaranya bersama istrinya, Tun Suhailah.

Pada *Galleria Seri Perdana*, bangunan memorial menampilkan konsep residensi dimana sebagian besar ruang-ruang penting dikekalkan sebagaimana semula. Objek/materi memorial lebih mengutamakan benda-benda peninggalan milik DR. Mahathir Mohammad, mulai dari koleksi pribadi maupun keluarganya, termasuk cendera mata yang diperoleh selamat menjabat perdana menteri. Ada juga bangunan-

bangunan landskap hasil dari keahlian beliau di bidang teknik. Khazanah arsip yang ditampilkan tidak terlalu banyak, lebih kepada bentuk klipping mengenai masa kepemimpinan dirinya. Oleh karenanya pembagian ruang memorial mengikuti sebagaimana ruang kediaman rumah dinas perdana menteri, termasuk keberadaan luar dari bangunan memorial, seperti taman dan garasi. Mobil dinas maupun pribadi milik Mahathir Mohammad juga dipamerkan dalam memorial.



Gambar 4.6. Galleria Seri Perdana

Dengan demikian, objek/materi memorial sebagian besar berupa benda-benda peninggalan milik negarawan semasa menjabat dan bertempat tinggal dikediaman rumah dinas jabatan. Namun, ada juga materi dalam bentuk arsip dengan segala macam bentuk medianya, seperti yang terdapat di *Tun Hussein Onn Memorial* dan *Proclamation of Independence Memorial*. Khazanah arsip tersebut ditampilkan tidak hanya dalam bentuk media kertas tetapi juga dalam bentuk media *audio visual* seperti foto dan film. Untuk arsip yang berbentuk kertas dan foto



dilakukan duplikasi dan reproduksi dalam ukuran yang lebih besar sehingga mudah dilihat dan terbaca oleh pengunjung.

c. Aspek sistem pengelolaan

Sebagian besar objek/materi dalam benda-benda peninggalan diperoleh dari adanya kerjasama dengan pihak keluarga ataupun ahli waris dari mantan perdana menteri. Namun demikian setiap objek/materi meskipun berupa benda-benda juga disertakan adanya deskripsi mengenai benda tersebut sehingga publik atau pengunjung mengetahui informasi dari benda-benda yang dipamerkan. Penataan terhadap dokumen yang ditampilkan ada pembatas antara benda yang dipamerkan dengan pengunjung yang melihat, tindakan ini dilakukan untuk mempertahankan fisik benda tidak disentuh atau dipindah oleh pengunjung yang melihat. Sementara pemeliharaan dilakukan ditempat dengan cara membersihkan benda-benda peninggalan, seandainya ada yang dibawa keluar dari memorial itu dalam rangka penambahan *ornamen* dari setiap benda yang dipamerkan.

Peran ANM sangat terlihat dari koleksi yang ditampilkan dalam *Tun Hussein Onn Memorial* dan *Proclamation of Independence Memorial*. Mulai dari akuisisi, pengolahan yang disertai adanya deskripsi dari setiap dokumen yang ditampilkan, maupun preservasi, terutama khazanah arsip foto yang sudah direproduksi dan ditampilkan dalam bentuk yang lebih besar, termasuk klipping koran. Kebutuhan akses oleh publik sangat diutamakan dalam penataan dokumen yang ditampilkan sehingga terlihat unsur *art* menjadi daya tarik bagi siapapun yang mengunjunginya.

Informasi arsip diperoleh dengan mempertimbangkan nilai guna informasional dan nilai guna kebugkutan, kemudian diolah sesuai deskripsi arsip dan dibuatkan deskripsi ulang sesuai kebutuhan pameran. Sumber arsip tetap dicantumkan dalam setiap dokumen yang ditampilkan. Arsip-arsip yang dipamerkan pada umumnya telah dilakukan reproduksi, baik dalam bentuk duplikasi maupun alih media kedalam ukuran yang lebih besar, semua kegiatan reproduksi ini dilakukan oleh ANM. Kegiatan restorasi arsip tidak dilakukan karena memang semua arsip yang ditampilkan sebelumnya sudah direproduksi sehingga arsip yang

ditampilkan dalam pameran secara fisik bukanlah yang autentik. Keberadaan arsip-arsip yang autentik tetap dikelola sepenuhnya oleh ANM.

Pemeliharaan dengan cara pembersihan terhadap objek/materi dilakukan secara rutin setiap hari senin, pada hari ini memorial ditutup untuk umum. Pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap minggu ini sekaligus untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana memorial yang mengalami kerusakan, seperti deskripsi maupun pembatas yang terdapat di sekitar memorial.

Secara umum memorial dikelola sebagaimana halnya sebuah museum, mulai dari perolehan, penataan hingga pemeliharaan, hanya dalam hal-hal tertentu pengelolaan memorial juga menggunakan kegiatan reproduksi khususnya terhadap arsip-arsip yang akan dipamerkan. Proses penambahan objek/materi lebih kepada kegiatan reproduksi arsip, yang dalam periode tertentu ditampilkan sesuai dengan ruang dan mempertimbangkan unsur keindahan. Selama ini tidak pernah ada koleksi yang dimusnahkan.

Dengan demikian tidak semua memorial melakukan sistem pengelolaan arsip. Dari semua memorial yang terdapat di Malaysia, hanya *Tun Hussein Onn. Memorial* dan *Proclamation of Independence Memorial* yang khazanah arsipnya merupakan perolehan dari peran ANM, mulai dari akuisisi, pengolahan, dan preservasi. Sistem pengelolaan arsip untuk memorial diatas telah dilakukan, namun untuk memorial lainnya tidak serta menerapkan sistem pengelolaan arsip. Memorial yang lain pada umumnya diperoleh dengan cara mempertahankan kondisi kediaman rumah dinas, karena memang pada memorial ini tidak semuanya menampilkan dalam media arsip, kecuali beberapa foto yang diperoleh dari ANM.

d. Aspek prasarana dan sarana

Penggunaan prasarana pada memorial ini pada umumnya tetap mempertahankan bangunan rumah dinas, kecuali *Proclamation of Independence Memorial* yang merupakan bangunan tempat rumusan perjuangan kemerdekaan Malaysia. Rumah dinas atau jabatan *Tun*

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

*Hussein Onn Memorial* sudah mengalami perubahan mendasar karena disesuaikan dengan penataan arsip dalam segala ukuran dan bentuk media. Prasarana lain selain berupa bangunan adalah taman, seperti yang terdapat di *Galleria Seri Perdana dan Tunku Abdul Rahman Putra Memorial*. Taman ini mempunyai fungsi tidak hanya untuk dipamerkan tetapi juga merupakan tempat melakukan suatu pesta maupun jamuan kenegaraan. Bangunan memorial sebagian besar mempunyai halaman dengan taman yang luas karena merupakan peninggalan rumah dinas, khusus di *Tun Hussein Onn Memorial* bahkan bangunan sudah menggunakan konsep teknologi perpaduan antara tampilan teknologi foto dan film.

Untuk sarana memorial, pada umumnya menggunakan sarana umum yang dipakai dalam suatu pameran. Setiap objek/materi terdapat deskripsi untuk menjelaskan informasi dari arsip ataupun benda-benda yang ditampilkan. Ukuran deskripsi pada umumnya seluas 15 x 40 cm., dan deskripsi ditampilkan dalam bentuk ketikan, dan ditampilkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa melayu. Selain itu, ada juga pembatas berupa tali/kain yang memisahkan antara pengunjung dengan benda-benda peninggalan yang dipamerkan, sementara untuk arsip pembatasnya berupa kaca. Adanya pembatas ini merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap semua dokumen yang dipamerkan.

Penggunaan kaca pameran dalam bentuk panel merupakan sarana untuk membatasi antara arsip yang dipamerkan dengan pengunjung. Setiap ruang panel kaca didukung oleh lampu. Penataan arsip dalam ruang panel kaca diatur dengan kemiringan 45 derajat dengan tujuan informasi deskripsi pada arsip mudah dibaca oleh pengunjung. Arsip diletakan pada suatu bahan kain sebagai alas yang berwarna gelap hijau, atau merah tua.

Dengan demikian penggunaan prasarana dan sarana memorial hampir sebagian besar berpedoman kepada teknik-teknik dalam melakukan sebuah pameran, dimana gedung sebagai tempat utama dari suatu pameran arsip maupun benda-benda peninggalan negarawan menjadi daya tarik pengunjung, begitupun sarana memorial yang

umumnya juga digunakan pada saat melakukan suatu pameran arsip dan bahan pustaka.

e. Aspek SDM

SDM yang terlibat di memorial selain *archivist* yang berperan sebagai pemandu pameran dan administrasi, juga didukung oleh tenaga teknis yang melakukan perawatan terhadap bangunan memorial. Jumlah SDM masing-masing memorial berbeda, disesuaikan banyaknya jumlah pengunjung. Pada *Proclamation of Independence Memorial* yang sering dikunjungi oleh pelajar maka banyak melibatkan *archivist*. Para *archivist* ini tidak semuanya berlatar belakang pendidikan sejarah namun ditunjang dengan kemampuan mengenai informasi yang terdapat dalam memorial dan kemampuan dalam menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa melayu dan bahasa Inggris. Sementara pada *Tunku Abdul Rahman Putra Memorial* dan *Tun Abdul Razak Memorial*, SDM yang terlibat disana tanpa didukung oleh *archivist* karena di dalam memorial tersebut tidak terdapat khazanah arsip.

Dalam pengorganisasian SDM pada memorial selain di *Proclamation of Independence Memorial* juga melibatkan salah seorang ahli waris dari setiap negarawan. Keberadaan ahli waris sebagai salah seorang pengurus memorial merupakan penghormatan terhadap ahli waris dan menjamin bahwa informasi yang terdapat pada memorial memiliki keabsahan dengan dokumen aslinya, selain itu juga sebagai 'akses' bagi ANM guna melengkapi khazanah arsip dan benda-benda peninggalan negarawan.

Dengan demikian dalam memorial terdapat banyak SDM yang terlibat, tidak hanya pegawai tetap ANM yang bertanggungjawab mengelola dan memelihara memorial tetapi juga melibatkan ahli waris dari keluarga negarawan yang semata-mata untuk menjamin keautentikan koleksi dari memorial.

f. Aspek akses publik

Semua memorial dapat dikunjungi oleh masyarakat setiap hari kecuali hari senin, karena pada hari tersebut diakui sebagai hari libur dalam rangka pemeliharaan terhadap memorial yang hari-hari

sebelumnya dikunjungi oleh publik. Jam kunjung memorial dimulai pagi jam 09.00 sampai dengan 16.30, terdapat juga jam istirahat dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00.

Publik yang datang ke memorial, khususnya di *Proclamation of Independence Memorial* juga didukung adanya brosur mengenai informasi yang terdapat di memorial. Brosur ditampilkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa melayu dan bahasa Inggris. Beberapa tempat memorial, disediakan cendera mata (*souvenir*) yang terkait dengan memorial masing-masing.

Informasi mengenai memorial secara umum juga dipublikasikan dalam bentuk website dengan alamat website [www.arkib.gov.my](http://www.arkib.gov.my). Pada website ini dijelaskan mengenai sejarah pendirian dan peresmian memorial, serta informasi mengenai setiap ruang dan benda-benda yang terdapat ataupun disimpan di memorial, termasuk tampilan gambar foto-foto. Itu artinya, secara umum akses publik terhadap memorial sangat terbuka, tidak hanya dalam bentuk kunjungan langsung tetapi juga dapat diakses oleh media elektronik. Akses yang dilakukan dengan media elektronik hanya menampilkan yang umum dan ikon dari koleksi yang terdapat dalam memorial. Untuk itu sasaran utama memorial tetap mengharapkan supaya pengunjung dapat datang langsung melihat memorial.

## **2. Thailand**

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Perjalanan bangsanya memperlihatkan peran suatu kerajaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok dan India, serta agama Budha. Ini terlihat dari kerajaan besar pada masa Kerajaan Sukhothai (1238-1438), Kerajaan Ayuthaya (1350). Memasuki abad 19 banyak perubahan besar dalam rangka menuju modernitas bangsa, termasuk perubahan nama suatu bangsa, yang semula bernama Siam, Muangthai dan Thailand. Sejak tahun 1932, pada saat kepemimpinan Perdana Menteri Plaek Pibulsonggram (Pibun), sistem kenegaraan yang dianutnya adalah sistem monarki konstitusional.

Pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kepemimpinan seorang perdana menteri. Peran menonjol dalam suatu kenegaraan berada di tangan seorang raja beserta keluarganya. Segala kehidupan raja dan keluarganya menjadi panutan bagi rakyatnya.

Sosok seorang raja dan keluarganya banyak yang diabadikan dalam bentuk bangunan memorial, seperti *Chakri Memorial* yang mengabadikan segala peninggalan dan perjuangan pada masa dinasti Chakri saat menghadapi Burma, begitupun *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park*. Ada juga memorial yang mencoba mengingatkan peristiwa perang pada masa kerajaan, seperti *Kanchanaburi-WWII War Memorial* dan *Phu Panyak Communist Memorial*. Peristiwa bencana tsunami yang langsung dibangun suatu memorial, yaitu *Frederick and Mary Tsunami Memorial* dan *Baan Nam Kem Tsunami Memorial*.

Selain menggunakan memorial, juga ada bangunan yang menggunakan istilah monumen dan museum, seperti *Victory Monument*, *Museum Chao Sam Phraya*, dan *The Bank of Thailand Museum* dan lain-lain. Pemakaian nama memorial juga dilakukan terhadap beberapa bangunan besar, seperti jembatan atau rumah sakit.

Dalam kajian ini yang langsung dikunjungi oleh peneliti adalah *The Bank of Thailand Museum* dan *Museum Chao Sam Phraya*. Sedangkan memorial lain dilakukan melalui pustaka. Adapun hasil kajian dan aspek-aspek dalam memorial di Thailand adalah sebagai berikut:

a) Aspek kelembagaan

Semua memorial, monumen dan museum diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Keberadaan memorial, monumen dan museum merupakan pusat model pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat (*model center for life-long learning*) yang perlu diketahui oleh generasi yang akan datang. Sebagian besar memorial diresmikan oleh raja ataupun salah seorang anggota kerajaan, seperti yang dilakukan Raja Bumibol Aduljadej dan Ratu Sirikit terhadap beberapa bangunan memorial, hal ini karena umumnya suatu memorial dibangun untuk mengenang dan

mengisahkan seorang raja ataupun keturunannya. Berbeda dengan monumen dan museum yang diresmikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan.

Pengelolaan memorial ada yang dikelola oleh keluarga kerajaan dalam bentuk lembaga dan ada pula yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, seperti *Museum Chao Sam Phraya* yang berdiri sejak 26 Desember 1961. Ada juga yang dikelola oleh suatu institusi yang mandiri dan diakui oleh pemerintah, sebagaimana *The Bank of Thailand Museum* yang pengelolaannya dilakukan oleh Bank Thailand, pada tanggal 9 Januari 1993.

Keberadaan memorial, monumen dan museum ini semuanya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan lembaga, ambil contoh *The Bank of Thailand Museum*, dimana bangunan museum ini mempunyai visi 'menjadikan museum mata uang Thailand berfungsi sepenuhnya sesuai standar internasional'.

Dengan kata lain secara organisatoris kelembagaan, pengelolaan memorial sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan. Memorial, monumen dan museum ini secara organisatoris berkedudukan tidak berada pada *National Archives of Thailand*.

b) Aspek objek/materi

Materi memorial sebagian besar berupa benda-benda peninggalan milik raja dan bangsawan kerajaan, ini dapat dilihat di *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park*. Ada juga koleksi yang disimpan memorial berupa benda-benda khusus tertentu seperti yang terdapat pada *The Bank of Thailand Museum* yang umumnya menampilkan mata uang baik dalam bentuk kertas maupun logam, ada juga beberapa arsip mengenai sejarah Bank Thailand. Disini, koleksi yang ditampilkan tidak hanya berupa arsip dengan segala bentuk media tetapi juga artefak yang biasanya disimpan dan dikelola oleh museum, sehingga museum ini dilengkapi oleh beberapa seperti ruang Paribatra yang memamerkan biografi

pangeran paribatra sukhumband pendiri istana Bangkhuprom Ada juga ruang untuk melakukan riset (*chumbhotbongse paribatra*), serta ruang *discovery*. Dengan segala aktivitas untuk mengetahui secara mendalam mengenai sejarah mata uang Thailand.

Selain itu objek/materi dalam suatu memorial ada juga dalam bentuk patung Budha ataupun raja, seperti yang terdapat di *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park*, dan *Museum Chao Sam Phraya*. Objek/material lainnya adalah berupa bangunan fisik yang berusaha mempertahankan antara bangunan dengan suatu peristiwa, ini dapat dilihat di *Kanchanaburi-WWII War Memorial* dan *Phu Panyak Communist Memorial*, *Frederick and Mary Tsunami Memorial* dan *Baan Nam Kem Tsunami Memorial*.

Secara umum objek/materi memorial tidak membatasi kepada koleksi dalam bentuk arsip dengan segala bentuk medianya tetapi juga bisa dalam bentuk artefak baik dalam bentuk benda-benda peninggalan dan patung, serta bangunan fisik yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi disekitar memorial.

c) Aspek sistem pengelolaan

Sistem pengelolaan arsip untuk memorial, tidak diperlihatkan secara langsung karena sebagian besar koleksi memorial lebih kepada artefak, benda-benda peninggalan, patung dan juga bangunan fisik, oleh karena itu sistem pengelolaan museum lebih terlihat mulai dari penciptaan, perancangan bangunan memorial/museum/monumen, pembuatan objek/materi, serta juga pemeliharaan, ini dapat dilihat di *Kanchanaburi-WWII War Memorial* dan *Phu Panyak Communist Memorial*, *Frederick and Mary Tsunami Memorial* dan *Baan Nam Kem Tsunami Memorial*.

Sistem pengelolaan arsip mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses dapat dicermati pada koleksi arsip di *The Bank of Thailand Museum*, dimana setengah dari koleksi museum tersebut berisi tentang biografi, sejarah mengenai keberadaan *The Bank of Thailand*.



Dengan demikian, pengelolaan memorial secara umum tidak menggunakan sistem pengelolaan arsip karena koleksi arsip yang disimpan jumlahnya sangat minim. Memorial dikelola dengan pengelolaan museum yang lebih menekankan kepada terpeliharanya bangunan fisik dari ancaman kerusakan dan kehancuran.

d) Aspek prasarana dan sarana

Penggunaan prasarana pada memorial ini pada umumnya tetap mempertahankan bangunan fisik ataupun benda-benda peninggalan seperti di *Kanchanaburi-WWII War Memorial* dan *Phu Panyak Communist Memorial*, *Frederick and Mary Tsunami Memorial* dan *Baan Nam Kem Tsunami Memorial*, termasuk juga di *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park* yang mencoba menampilkan memorial tidak hanya bangunan fisik tetapi juga berupa taman. Namun ada juga memorial yang merupakan bangunan istana sebagai tempat menyimpan koleksi, seperti di *Museum Chao Sam Phraya* atau *The Bank of Thailand Museum*, yang sebagian ruang berada di wilayah *istana Bangkhuprom*.

Sementara sarana memorial yang digunakan, pada umumnya menggunakan sarana umum yang dipakai dalam suatu pameran. Setiap objek/materi terdapat deskripsi untuk menjelaskan informasi dari benda-benda yang ditampilkan. Ada juga pembatas berupa tali/kain yang memisahkan antara pengunjung dengan benda-benda peninggalan yang dipamerkan, sementara untuk arsip pembatasnya sebagaimana yang digunakan pada meorial di Malaysia.

Prasarana dan sarana memorial lebih kepada pengelolaan suatu museum atau monumen sehingga bentuk fisik prasarana dan sarana memorial lebih berupaya untuk kebutuhan pengunjung dimana unsur keindahan dan kemudahan pengunjung untuk melihat koleksi memorial menjadi prioritas.

e). Aspek SDM

SDM yang terlibat di memorial sebagian besar merupakan tenaga kerja kontrak (*out sourcing*) karena pekerjaan yang dilakukan

hanya melakukan kegiatan administrasi tamu dan pemeliharaan terhadap objek/materi memorial. Namun khusus di *The Bank of Thailand Museum*, SDM nya merupakan pekerja tetap Bank of Thailand yang menguasai sejarah perkembangan keuangan di Thailand. Sementara di memorial lain, sebagian kecil pegawai dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan.

Dari segi penanggungjawab melibatkan beberapa orang sejarawan, atau pemerhati sejarah yang mengetahui keberadaan memorial, seperti di *Kanchanaburi-WWII War Memorial* dan *Phu Panyak Communist Memorial*, *Frederick and Mary Tsunami Memorial* dan *Baan Nam Kem Tsunami Memorial*. Sementara di *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park* melibatkan salah seorang keluarga atau keturunan raja, bahkan Raja pun menjadi pelindung dari keberadaan memorial yang mengkisahkan raja dan kerajaannya.

SDM yang terlibat sebagian besar kurang menguasai bahasa asing, mereka hanya bahasa Thailand atau setempat namun sikap ramah dan bersahabat tetap ditampilkan oleh mereka meskipun mengalami hambatan segi bahasa.

Dengan demikian SDM di memorial lebih mengutamakan tenaga administrasi dan teknisi pemeliharaan, tidak semua memorial dan museum didukung sejarawan atau pemerhati sejarah namun demikian mereka pada umumnya merangkap antara petugas administrasi sekaligus sebagai pemandu bagi pengunjung.

f). Aspek akses publik

Pada prinsipnya semua memorial, museum dan monumen bersifat terbuka, bisa dikunjungi dan di akses oleh publik, bahkan ada beberapa tempat dikunjungi sebagai melakukan kegiatan sembahyang bagi agama Budha, seperti di *King Rama II Memorial* dan *The Princess Mother Memorial Park*.

Tidak semua memorial dilengkapi dengan brosur, terlebih brosur yang disertai dengan bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan keberadaan memorial tidak identik untuk mendatangkan wisatawan

asing tetapi juga untuk domestik. Sehingga banyak brosur yang menggunakan bahasa Thailand. Namun di *The Bank of Thailand Museum* sudah dilengkapi dengan bahasa asing, baik Inggris dan China.

## **B. Deskripsi Penyelenggaraan Museum/Memorial di Indonesia**

Istilah memorial tidak dikenal dan digunakan di Indonesia. Tempat atau bangunan yang mengkoleksi dan menyimpan benda-benda bersejarah atau peristiwa masa lampau di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah museum ataupun monumen. Keberadaan museum atau monumen sebagai tempat koleksi tidak membatasi jenis pengkategorian suatu objek/materi sebagaimana halnya yang terdapat di Malaysia dan Thailand, yang membedakan istilah memorial untuk koleksi yang berasal dari individu/perseorangan dari seorang negarawan atau bangsawan.

Dalam kajian memorial yang mengambil lokasi penelitian di Indonesia maka terdapat beberapa museum atau monumen yang menjadi objek penelitian, khususnya hasil koleksi individu. Individu yang dimaksud tidak hanya orang per orang tetapi juga bisa individu mengenai peristiwa ataupun kelompok organisasi tertentu. Dalam hal ini penelitian mengambil objek kajian di Monumen Nasional, Monumen Pancasila Sakti, Museum Satria Mandala, Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Museum Purna Bhakti, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Nasional.

### **1. Aspek kelembagaan**

Pengelolaan monumen dan museum di Indonesia pada umumnya menjadi tanggung jawab pendiri, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ataupun oleh lembaga pemerintah baik itu tingkat pusat ataupun provinsi. Ada pula yang dikelola oleh suatu yayasan. Namun demikian, semua monumen dan museum tersebut terkoordinir informasinya oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Museum Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Kebangkitan Nasional merupakan salah satu museum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Nasional merupakan peninggalan pemerintah Belanda sejak tahun 1778. Ketika itu masih bernama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BG), suatu lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Lembaga ini mempunyai semboyan '*Ten Nutte van het Algemeen*' atau 'untuk kepentingan masyarakat umum'. Sejak tahun 1923 BG memperoleh gelar tambahan '*Koninklijk*' pada awal nama BG dan berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Lembaga Kebudayaan Indonesia kemudian menyerahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 17 September 1962, dan menjadi Museum Pusat, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Museum Nasional berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 092/O/1979 tanggal 28 Mei 1979.

Begitupun dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang merupakan saksi sejarah bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Di gedung ini para tokoh-tokoh kemerdekaan mencoba merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Museum ini diakui dan ditetapkan oleh pemerintah melalui SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0476/O/1992 tanggal 24 November 1992. Museum Perumusan Naskah Proklamasi saat ini dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara Museum Satria Mandala dan Monumen Pancasila Sakti merupakan museum yang pengelolaannya berada dibawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), begitupun dengan museum POLRI yang berada di bawah lembaga Mabes POLRI. Masing-masing museum ini berupaya memperlihatkan nilai-nilai juang yang patut diteladani oleh generasi penerus. Pembangunan Museum Satria Mandala merupakan peninggalan wisma Yaso atau rumah bekas ibu Hartini Soekarno dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1972. Sementara Monumen Pancasila Sakti pembangunannya dimulai sejak tahun 1972, monumen ini mengambil lokasi yang sama dengan peristiwa G.30.S/PKI di daerah Lubang

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Buaya. Baik Museum Satria Mandala dan Monumen Nasional secara organisatoris berada dibawah Pusat Sejarah TNI Mabes TNI. Oleh karenanya pengelolaan keberadaan kedua museum ini menjadi tanggung jawab Mabes TNI. Hal yang serupa juga di Museum POLRI, museum yang belum berusia 5 tahun ini dibangun atas inisiatif Mabes POLRI dalam rangka mengenal riwayat sejarah, jati diri, dan pembentukan POLRI di Republik Indonesia. Museum POLRI dikelola oleh Mabes POLRI dibawah Pusat Sejarah POLRI.

Selain pemerintah pusat yang memiliki museum atau monumen, ada pula pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, contohnya terhadap pengelolaan Monas yang secara resmi dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 1975, sedangkan pembangunannya dimulai sejak tahun 1961. Monumen ini secara kelembagaan berada dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Monas atau sering disebut monumen keagungan perjuangan bangsa Indonesia ini dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Monumen Nasional.

Demikian pula Museum Kebangkitan Nasional atau dikenal dengan nama gedung STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche*) merupakan museum tentang bangunan sebagai tempat berlangsungnya peristiwa sejarah, khususnya pergerakan BUDI UTOMO pada tanggal 20 Mei 1908, sampai lahirnya SUMPAAH PEMUDA yang menjelmakan trilogi : Satu Nusa-Satu Bangsa-satu Bahasa. Keberadaan Museum Kebangkitan Nasional diakui sebagai bangunan cagar sejarah yang telah dipugar sejak April 1973 oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta.

Hal berbeda dengan Museum Purna Bhakti yang sepenuhnya dikelola oleh Yayasan. Museum Purna Bhakti merupakan representasi dari perjalanan karier seorang presiden yang melakukan kerjasama dengan pimpinan negara lain. Berbagai macam cendera mata maupun bentuk penghargaan yang diterima oleh Presiden Soeharto dikumpulkan dalam suatu wadah di Museum Purna Bhakti ini yang dibangun sejak tahun 1987 dan mulai diresmikan penggunaannya sejak tahun 1992.

Dengan demikian, keberadaan museum ataupun monumen yang berada di Indonesia tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat atau lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian Pariwisata selaku penanggungjawab pengelolaan dan pelestarian dari museum. Peran serta dari lembaga pemerintah lain seperti yang diperlihatkan oleh Mabes TNI dan Mabes POLRI menjadi suatu contoh kemandirian dari institusinya untuk melestarikan segala warisan sejarah yang dimilikinya, demikian pula keterlibatan pemerintah daerah maupun yayasan. Secara kelembagaan, pengelolaan museum ataupun monumen dapat saja dilakukan secara independen sepanjang informasi yang terdapat di museum ataupun monumen dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai corong informasi mengenai keberadaan museum ataupun monumen tingkat nasional dan pusat, begitupun dengan yang berada di daerah semua informasi dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata Pemerintah provinsi.

2. Aspek objek/ materi

Objek/materi dari museum dan monumen di Indonesia ini mempunyai koleksi yang beragam jenis, ada yang berupa artefak seperti di Museum Nasional, Museum Satria Mandala, Museum POLRI dan juga cendera mata yang terdapat di Museum Satria Mandala. Bahkan artefak yang dikoleksi Museum nasional ini dikelompokkan menjadi tujuh jenis koleksi, yaitu: koleksi prasejarah, arkeologi, keramik, numismatik dan heraldik, relik sejarah, etnografi dan geografi. Ada pula yang berjenis relief dan diorama, seperti yang ditampilkan di Museum Satria Mandala, Museum Kebangkitan Nasional, Museum POLRI, Monumen Pancasila Sakti, dan Monas. Untuk yang di Monas, diorama menceritakan perjalanan bangsa Indonesia mulai dari zaman pra sejarah sampai zaman pembangunan orde baru. Disamping itu juga ada suatu diorama yang menceritakan sejarah proses pembangunan tugu Monas serta penjelasan mengenai bagian-bagian tugu nasional, termasuk pembangunan gedung dan pemugaran gedung di Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selain itu ada

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

monumen mengenai Soekarno-Hatta selaku proklamator kemerdekaan RI, mulai dari gagasan, makna simbol-simbolnya serta tugu kilat dan tugu peringatan satu tahun. Di bagian luar, ada taman merdeka yang dilengkapi patung Pangeran Diponegoro.

Sementara di Museum Satria Mandala dan Museum POLRI banyak pula menampilkan benda-benda alat atau sistem persenjataan dalam rangka penegakan hukum yang digunakan pada masa periode tertentu sehingga memperlihatkan gambaran perkembangan teknologi yang dimanfaatkan POLRI dalam upayanya menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak hukum. Di Museum POLRI ini menampilkan pula gaya kepemimpinan dan kepribadian pemimpinannya. Juga ada ruang kepahlawanan, yang menampilkan sosok polisi di mata masyarakat. Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga menampilkan beberapa orang tokoh kemerdekaan yang terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi, sementara di Museum Kebangkitan Nasional menampilkan tokoh-tokoh pergerakan, baik dalam bentuk diorama maupun benda-benda yang pernah digunakan dalam kegiatan kemerdekaan dan pergerakan kebangsaan.

Selain itu ada yang berjenis dalam bentuk arsip yang bermediakan kertas meskipun koleksinya hanya sedikit, seperti yang terdapat di Museum POLRI, Museum Naskah Proklamasi, dan Museum Satria Mandala. Untuk arsip yang berbentuk lain, umumnya berupa foto-foto, seperti di Museum Satria Mandala dan Museum POLRI. Ada pula arsip yang bermediakan audio visual, seperti penayangan sebuah film dokumenter, ini terdapat di Museum Polri, Museum Purna Bhakti, termasuk Monas melalui rekaman suara mengenai sejarah pendirian bangunan Monas. Monas juga memiliki 2 ruang pameran, yaitu museum sejarah dengan dioramanya, dan ruang kemerdekaan yang berbentuk amphitheater yang terletak di cawan tugu, dengan empat atributnya yang meliputi: peta kepulauan Negara RI, Lambang Negara Bhineka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan. Koleksi berupa buku-buku bahan pustaka juga tersimpan

di Museum Satria Mandala, Museum POLRI, dan Museum Satria Mandala.

Pada prinsipnya objek/materi monumen atau museum ini merupakan segala bentuk peninggalan yang terjadi dalam suatu peristiwa tertentu yang menceritakan semua kejadian termasuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Khusus yang berada di Museum Purna Bhakti, lebih menceritakan sosok presiden Soeharto dan keluarganya dalam hubungannya dengan pihak lain, baik itu internasional ataupun nasional.

3. Aspek sistem pengelolaan

Koleksi di Museum Nasional merupakan peninggalan jaman pemerintah Belanda yang dikumpulkan di rumah besar milik JCM. Radermacher serta Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles saat pemerintahan Inggris berkuasa di Indonesia (1811-1816). Sedangkan koleksi pada Museum Satria Mandala berasal dari sumbangan masing-masing induk seperti dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, maupun yang diperoleh dari perseorangan seperti milik Jenderal Soedirman, Jenderal Oerip Soemohardjo, dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasoetion untuk Museum Satria Mandala. Sementara yang ada di Museum POLRI semuanya milik POLRI. Museum Purna Bhakti pada umumnya sebagian besar merupakan milik pribadi presiden Soeharto yang dikumpulkan oleh istrinya Ibu Tien Soeharto karena koleksinya berupa peninggalan cendera mata. Beberapa koleksi yang lain pada umumnya merupakan buatan relief dan diorama, seperti di Monumen Pancasila Sakti dan Monas.

Proses akuisisi dilakukan untuk semua benda-benda atau peninggalan yang sebelumnya milik tokoh pahlawan ataupun milik lembaga, seperti yang di Museum Satria Mandala dan Monumen Pancasila Sakti, sebagian besar berupa hibah dari mereka kepada museum.

Dalam hal pengolahan museum dan monumen, semuanya melibatkan para kurator, terutama untuk mengidentifikasi benda-benda artefak yang terdapat di Museum Nasional. Pemeliharaan museum dan



monumen dilakukan lebih kepada ancaman kerusakan artefak yang diakibatkan oleh unsur fisika, yaitu debu, cahaya, dan partikel kecil lainnya. Pemeliharaan dilakukan secara rutin pada setiap hari senin, yang merupakan hari libur bagi keberadaan suatu museum. Pemilihan hari senin ini dikarenakan pada hari sebelumnya, yaitu sabtu dan minggu, terjadi adanya lonjakan pengunjung dibanding dengan hari-hari biasa sehingga berdampak terhadap kebersihan dari museum itu sendiri. Kegiatan preservasi dilakukan jika diketemukan adanya kerusakan terhadap koleksi yang terdapat di museum dan monumen, tindakan preservasi yang dimaksud lebih kepada upaya pencegahan dan bukan perawatan. Pemeliharaan dalam bentuk pengecatan dan penambahan oli juga dilakukan terhadap alat-alat persenjataan seperti pesawat, mobil dan senjata lainnya yang terdapat di Museum Satria Mandala, begitupun dengan melakukan pemugaran terhadap bangunan dan gedung-gedung yang dijadikan cagar sejarah, seperti di Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Kegiatan sistem pengelolaan arsip hanya tampak di tataran akuisisi dan pemeliharaan, akuisisi yang dimaksud lebih dalam bentuk hibah, sedangkan pemeliharaan pada umumnya lebih kepada pencegahan kerusakan dan tentunya pengamanan terhadap barang-barang koleksi yang terdapat di museum dan monumen.

#### 4. Aspek prasarana dan sarana

Bangunan sebagai prasarana yang dimiliki museum ataupun monumen merupakan suatu tempat atau wadah untuk menyimpan dan menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan suatu peristiwa. Contohnya, museum bekas peninggalan rumah seseorang, seperti di Museum Satria Mandala dan Museum Nasional. Bahkan ada beberapa museum yang memang mengandalkan suatu bangunan sebagai objek informasi budaya dan sejarah seperti di Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada juga di tanah lapang tempat terjadinya suatu peristiwa, seperti di Monas dan Monumen Pancasila Sakti. Pemilihan lokasi untuk kedua monumen ini mencoba mengenang suatu peristiwa yang terjadi di tempat tertentu dengan

mendirikan suatu monumen. Pada bangunan Monas, dibuat suatu bangunan dalam dua bentuk ciri khas, yaitu lingga dan yoni sebagai simbol sejak jaman dulu untuk menggambarkan kehidupan abadi, termasuk bangunan bentuk lidah api di puncak Monas yang menggambarkan semangat yang tak akan pernah padam.

Sementara ada pula bangunan yang mengambil lokasi di kantor pusat, yaitu Museum POLRI. Museum POLRI ini merupakan museum semi modern dengan desain bangunan tahun 70-an ditambah dengan jendela-jendela modern menambah kesan klasik modern dengan desain interior mendasari konsep galeri.

Sementara untuk Museum Purna Bhakti bangunannya terletak berdampingan dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), bangunan ini merupakan bangunan baru yang khusus dibangun untuk menyimpan semua koleksi cendera mata milik pribadi Presiden Soeharto. Ciri bangunan Museum Purna Bhakti ini adalah berbentuk tumpeng sebagai simbol Jawa yang bermakna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih presiden Soeharto selama pengabdianya sebagai presiden kepada bangsa Indonesia.

Dari segi sarana, pada umumnya menggunakan sarana yang khusus digunakan untuk suatu pameran. Dimana setiap koleksi didukung oleh adanya deskripsi informasi mulai dari nama peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu kejadian. Sebagian besar koleksi terletak dalam suatu ornamen kaca, kecuali benda-benda atau alat persenjataan berat yang terdapat di Museum Satria Mandala dan Museum POLRI. Untuk koleksi yang secara fisik besar maka hanya dilengkapi dengan deskripsi informasi dan tidak ada pembatas ornamen kaca, seperti yang di Monumen Pancasila Sakti, Museum Nasional, dan Museum Satria Mandala. Semua museum dan monumen juga dilengkapi dengan sarana pengamanan seperti kamera CCTV dan petugas piket 24 jam, baik yang didalam maupun diluar museum dan monumen. Fasilitas lain selain bangunan atau ruang pameran, juga ada beberapa lokasi untuk penjualan souvenir, kantin, mushola, dan toilet, serta juga ruang perkantoran buat petugas museum dan monumen.

Dengan demikian pada aspek prasarana dan sarana ini, baik museum dan monumen mengedepankan visual yang dipersiapkan untuk suatu pameran dan dikunjungi oleh banyak orang, sehingga prasarana dan sarana dibuat standar sedemikian rupa untuk kepuasan pengunjung guna melihat sebuah koleksi yang terdapat pada museum.

5. Aspek SDM

SDM yang terlibat di museum dan monumen pada umumnya berstatus PNS, namun ada juga yang non PNS seperti di Museum Purna Bhakti. SDM dikelompokkan kedalam bidang administrasi, teknis, dan pemandu. Khusus yang bidang teknis didukung oleh tenaga konservator seperti di Museum Nasional dan Museum Satria Mandala. Mereka-mereka ini mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam melakukan pemeliharaan terhadap artefak. Sementara untuk pemandu mempunyai keahlian dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau kursus pramuwidy, seperti di Museum Nasional, Monumen Pancasila Sakti, Museum Satria Mandala, dan Museum POLRI. Bahkan ada juga yang didampingi oleh Perwira Sejarah seperti di Museum Satria Mandala dan Museum POLRI. Selain itu ada juga kurator museum seperti Museum Nasional.

Setiap museum dan monumen dipimpin oleh seorang kepala museum atau monumen, mereka umumnya membawahi seksi instalasi umum, seksi instalasi koleksi, seksi bimbingan dan informasi. Jumlah SDM rata-rata hanya memiliki belasan orang petugas resmi ditambah dengan beberapa *office boy* yang sifatnya *out-sourcing*. Khusus kurator dan konservator tidak selamanya bertugas di lokasi, mereka hadir pada saat dibutuhkan.

Dengan demikian, banyak profesi yang terlibat untuk mengelola museum dan monumen ini, yaitu kurator, konservator, pemandu dan administrasi. Mereka pada umumnya sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan museum.

6. Aspek akses publik

Publik dipersilakan untuk mengunjungi dan melihat langsung museum dan monumen pada setiap hari dan hari libur, kecuali hari senin

tutup. Informasi mengenai keberadaan museum dan monumen ini pada umumnya diinformasikan pula oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Pemprov. DKI Jakarta. Semua museum dan monumen didukung oleh publikasi yang dilakukan dengan media internet dan masing-masing memiliki website sendiri, disertai peta lokasi dan kendaraan menuju ke lokasi museum. Begitupun saat kita berkunjung langsung ke lokasi, informasi museum dan monumen juga ditampilkan dalam bentuk brosur, baik bahasa Indonesia dan Inggris, bahkan di Museum POLRI brosur atau pamflet mengenai museum ditampilkan dalam 10 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, China, Arab, Jepang, Korea, Tamil India, Belanda, Perancis, Jerman. Akses publik di Museum Satria Mandala dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tamu VIP, umum, dan pelajar, begitu pula yang terjadi di Museum POLRI dan Monumen Nasional.

Secara umum dalam akses publik, tidak ada koleksi yang bersifat rahasia, semuanya terbuka hanya saja ada beberapa objek yang memerlukan kehati-hatian untuk dapat diakses publik, hal ini guna menghindari kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh kehadiran pengunjung.

Berdasarkan uraian deskripsi mengenai memorial di atas baik yang terdapat di Malaysia dan Thailand, serta juga deskripsi yang terdapat di Indonesia dalam bentuk museum ataupun monumen, maka berikut ini akan disajikan rangkuman secara umum deskripsi mengenai kajian memorial yang meliputi aspek kelembagaan, aspek objek/materi, aspek sistem pengelolaan, aspek prasarana dan sarana, aspek SDM, dan aspek akses publik.

Pada aspek kelembagaan, sejarah pembangunan memorial, museum ataupun monumen umumnya mempunyai alasan riwayat pendirian yang hampir serupa, yaitu mencoba mengenang segala hal yang tercipta, pernah dimiliki, ataupun menjadi barang peninggalan dari suatu tokoh ataupun peristiwa, yang patut dikenang bagi generasi penerus yang akan datang. Pada memorial, koleksi yang ditampilkan merupakan bukti peninggalan dari seorang ataupun beberapa orang

tokoh, baik itu negarawan atau pahlawan saat yang bersangkutan menjabat dan atau menjadi pelaku dari suatu peristiwa. Sedangkan pada museum lebih mengutamakan koleksi berupa benda-benda artefak dari suatu periode ke periode lain dalam satu objek yang sama. Museum tidak membatasi kepada kepemilikan ataupun peninggalan dari seseorang negarawan atau pahlawan tetapi mencoba menampilkan keseluruhan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah pada kurun periode tertentu berikut benda-benda peninggalan yang pernah digunakan. Sementara monumen, mengutamakan suatu bangunan khusus yang berbentuk tugu atau sejenisnya dimana bangunan tersebut memberikan makna terhadap suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat tertentu. Bangunan ini menjadi 'ikon dari suatu monumen, bahkan tak jarang dibangun dalam ukuran yang lebih besar dari wujud aslinya.

Pengelolaan memorial dan monumen, umumnya dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat dan daerah, sementara untuk museum dimungkinkan pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh yayasan. Memorial dan monumen dikelola oleh pemerintah karena objek/materi yang dikoleksi sebelumnya merupakan benda-benda peninggalan milik negara, sedangkan museum sebagian koleksinya merupakan keterlibatan dari kurator ataupun pihak-pihak tertentu yang mengkoleksi dan menyimpan artefak ataupun benda-benda sejarah sehingga bisa dikelola oleh yayasan. Lazimnya, yayasan tersebut mempunyai jaringan dengan pihak keluarga yang menjadi objek dari memorial, museum atau monumen. Dengan sendirinya pengelolaan memorial, monumen, dan museum yang dikelola pemerintah mempunyai sumber dana tetap dari pemerintah. Sementara bagi museum yang dikelola yayasan mempunyai sumber dana dari masyarakat ataupun sekelompok organisasi yang peduli terhadap museum.

Dalam struktur organisasi, pengelolaan memorial, monumen, dan museum merupakan suatu unit kerja pengelola mandiri yang dipimpin oleh pejabat eselonering tertentu. Sementara untuk museum yang

dikelola oleh yayasan, pada umumnya dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai akses ke pemerintah. Sebagai suatu unit kerja pengelola maka memorial, museum, dan monumen ini didukung oleh unit kerja yang mempunyai fungsi untuk melakukan koleksi, pemeliharaan, dan penyajian informasi, selain juga dukungan administrasi. Dalam hal penyebaran informasi keberadaan memorial, museum, dan monumen selaku pelestari warisan budaya, maka dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebudayaan dan pariwisata.

Setiap memorial, museum, dan monumen pada umumnya merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah yang bertanggungjawab mengelolanya. Dengan demikian keberadaan memorial, museum, dan monumen sejalan dengan visi dan misi lembaga pemerintah dan bukan program *instant*, tetapi merupakan bentuk pengejawantahan yang dituangkan dengan pembangunan memorial, museum, dan monumen. Dan, bagi yayasan yang mendirikan museum maka perlu dilengkapi dengan legalitas formal mengenai kegiatannya dalam mengelola museum.

Dalam aspek objek/materi ataupun koleksi maka memorial, museum, dan monumen tidak membatasi dari segi bentuk media dan ukuran. Museum mempunyai koleksi berupa artefak, lebih kepada benda-benda tiga dimensi dalam bentuk ornamen yang asli dan pernah digunakan pada masa periode tertentu, termasuk bangunan dan ruang-ruang bersejarah yang pernah digunakan oleh pejuang kemerdekaan dan pergerakan perjuangan bangsa. Sedangkan memorial dan monumen, disamping menyimpan artefak juga dilengkapi dengan diorama, yaitu suatu ruang pameran yang dilengkapi dengan ornamen mini yang menceritakan perjalanan suatu peristiwa pada satu periode ke periode yang lain. Secara umum, baik itu memorial, museum, dan monumen dimungkinkan juga menyimpan koleksi dalam bentuk arsip, baik itu arsip tekstual, arsip kartografi, dan arsip audio visual. Khusus untuk monumen, sebagian besar bangunan yang menjadi 'ikon' nya

adalah bangunan berbentuk patung ataupun tugu, yang mengingatkan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di tempat tersebut pada suatu periode tertentu. Tidak semua arsip yang ditampilkan itu *original*, sebagian besar merupakan bentuk duplikasi ataupun reproduksi dalam berbagai ukuran, namun yang mengolah ataupun yang melakukan reproduksi tetaplah dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang kearsipan. Oleh karenanya, autentikasi terhadap arsip yang ditampilkan sebagai koleksi harus dilakukan demi kepuasan bagi pengunjung yang melihat arsip tersebut.

Berdasarkan koleksi yang ada maka secara tipologis, baik itu museum dan monumen sebagai objek kajian masuk kategori museum umum, karena koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material hasil budaya manusia (perorangan ataupun kelompok) dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara untuk memorial masuk kategori museum memorial, karena koleksi yang ditampilkan mengkhususkan pada preservasi dan presentasi benda-benda yang berkaitan erat dengan kepemilikan seseorang ataupun dengan suatu peristiwa tertentu.

Sementara dalam aspek sistem pengelolaan, baik itu memorial, museum, dan monumen mempunyai sistem pengelolaan yang serupa dengan tiga fungsi utamanya, yaitu: koleksi, pemeliharaan, dan penyajian informasi. Dalam hal koleksi, maka diperlukan upaya penarikan terhadap artefak dan arsip yang sebelumnya disimpan dan dikelola oleh pihak lain. Disini, dibutuhkan kepercayaan dari pihak penyimpan sebelumnya untuk selanjutnya dikelola dan menjadi milik memorial dan museum. Artinya, terjadi pengalihan tanggung jawab pengelolaan dari milik perorangan kepada pihak memorial ataupun museum. Kegiatan pengkoleksian ini serupa dengan akuisisi arsip, dimana koleksi arsip ataupun artefak diperoleh dengan cara-cara hibah, jual, ataupun ganti rugi. Pada monumen, karena koleksinya sangat minim yang berbentuk artefak dan arsip maka tidak dilakukan akuisisi, tetapi lebih banyak berupa bangunan dalam wujud diorama ataupun bangunan tugu dan patung.

Semua koleksi telah dilengkapi dengan deskripsi informasi, bahkan ada deskripsi informasi yang dalam bentuk 2 bahasa (selain bahasa setempat, juga ada bahasa Inggris). Standar deskripsi informasi juga telah diterapkan secara internasional, disertai sumber dari mana koleksi itu didapatkannya. Dalam melakukan pengolahan koleksi, menerapkan prinsip yang menjamin bahwa koleksi yang ditampilkan adalah peristiwa yang benar-benar terjadi.

Pemeliharaan memorial, museum, dan monumen dilakukan secara preventif dan kuratif. Tindakan preventif lebih banyak dikerjakan karena koleksinya lebih banyak berupa artefak benda tiga dimensi sehingga kotoran berupa partikel debu dan sejenisnya harus dibersihkan secara rutin seminggu sekali, biasanya dilakukan pada hari senin, termasuk upaya pengecatan ulang terhadap benda-benda yang memerlukan pengecatan sehingga tetap dalam keadaan semula atau tidak kumuh, biasanya dilakukan dua tahun sekali. Sementara untuk tindakan kuratif, melibatkan tenaga konservator yang melakukan perawatan terhadap semua koleksi yang dikelola oleh memorial, museum, dan monumen. Sejauh ini tidak ada koleksi yang mengalami keusangan atau dihapuskan, karena ketika koleksi mendekati kerusakan maka terlebih dahulu telah dilakukan kegiatan kuratif melalui restorasi. Dengan demikian sistem pengelolaan pada memorial, museum, dan monumen lebih mengutamakan kegiatan *preservasi* (pemeliharaan) dan *konservasi* (pelestarian) sebagaimana halnya standard pengelolaan museum.

Dalam aspek prasarana dan sarana, sebagian besar lokasi memorial dan museum merupakan bekas rumah atau kediaman peninggalan seseorang yang ketika pada masa dahulu melakukan kegiatan koleksi terhadap beberapa benda material yang mempunyai informasi sejarah dan budaya. Sementara monumen, merupakan tempat atau lokasi di suatu wilayah tertentu yang kemudian disekitar tersebut dibuatkan bangunan tugu atau patung sebagai penanda adanya suatu peristiwa yang patut diketahui oleh masyarakat pada masa sekarang. Sedangkan sarana yang menjadi prioritas dari memorial, museum, dan



monumen ini adalah segala peralatan yang berhubungan erat dengan kegiatan pelestarian dan pengamanan terhadap koleksi, termasuk sarana untuk kebutuhan pameran. Dengan demikian pada aspek prasarana dan sarana ini, gedung atau bangunan yang bersertifikat dan berkekuatan hukum menjadi prioritas dalam mendirikan suatu memorial, museum, dan monumen. Demikian pula terhadap penggunaan sarana harus memenuhi standar sebagaimana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengamanan suatu bahan koleksi yang bernilai sejarah.

Aspek SDM berdasarkan deskripsi kajian sebelumnya, dimana objek/materinya lebih banyak berupa artefak dan diorama maka melibatkan beberapa profesi diantaranya: (1) kurator selaku profesi yang mengumpulkan bahan-bahan ataupun artefak sebagai objek materi; (2) konservator selaku profesi yang bertugas melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap artefak maupun dokumen jenis lainnya; (3) penyaji/preparasi selaku profesi yang mempunyai peran untuk menyajikan koleksi sebagai suatu karya seni dan budaya; (4) pemandu selaku profesi yang memberikan edukasi kepada publik mengenai koleksinya. Selain profesi diatas, dukungan administrator sebagai pimpinan unit pengelola memorial, museum, dan monumen menjadi bagian yang terpenting karena segala kebijakan yang terkait dengan memorial, museum, dan monumen sangat ditentukan dari kemampuan administrator untuk melakukan pelestarian terhadap koleksi dan warisan budaya, termasuk menyebarluaskan informasinya ke publik.

Aspek yang terakhir adalah akses publik. Memorial, museum, dan monumen umumnya mempunyai peran sebagai *memory bank* yang menyajikan berbagai aspek sejarah, kebudayaan, dan tokoh penting oleh karenanya penyajian koleksi harus memberi daya tarik bagi pengunjung melalui penataan yang teratur sesuai *hall of fame* sehingga informasi dari koleksi tersebut memandu pengunjung untuk mengetahui dan mengenal sejarah dan budaya yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Untuk itu, informasi dari memorial, museum, dan monumen tidak hanya dilihat secara fisik langsung saja

tetapi juga memanfaatkan media teknologi sehingga memancing masyarakat untuk dapat hadir dan berkunjung ke memorial, museum, dan monumen.

### **C. Model Memorial Presidensial di Indonesia**

Rencana pembangunan memorial presiden di Indonesia merupakan gagasan konstruktif dalam rangka mengenang dan merefleksikan perjalanan seorang presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. ANRI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan dapat berperan dalam menyajikan arsip dari seorang presiden sehingga mampu menghadirkan suatu identitas, jati diri, dan memori kepemimpinan seorang presiden sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban presiden dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan peran tersebut maka diperlukan suatu wadah atau tempat yang mampu mengumpulkan arsip dan memamerkannya kepada masyarakat. Wadah yang dimaksud berupa bangunan memorial yang diperuntukkan dan mengkhususkan pada kegiatan preservasi dan diseminasi arsip milik individu atau perorangan yang telah berjasa bagi negara dan bangsanya. Dalam konteks memorial presiden maka terkait dengan seorang presiden dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan presiden berikutnya. Memorial presiden di Indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimana ada 6 orang yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Soekarno, Suharto, BJ. Habibie, KH. Abdurrachman Wachid, Megawati, dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Karena objek utamanya adalah presiden maka dinamakan dengan memorial presiden yang dikelola oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan tingkat pusat.

Memorial bisa juga diperuntukkan khusus untuk arsip para gubernur, tentunya pengelolaannya dilakukan oleh lembaga kearsipan provinsi. Demikian pula memorial khusus para bupati ataupun walikota yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota, serta memorial khusus rektor yang

# **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

dikelola oleh arsip perguruan tinggi. Dengan demikian lembaga kearsipan baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dapat membangun suatu memorial yang diperuntukkan secara khusus sesuai dengan memori perjalanan seorang pemimpin lewat pemanfaatan arsip yang diciptakan oleh mereka saat menjabat sebagai pimpinan dalam suatu wilayah tertentu dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai suatu model, maka memorial presiden yang rencananya dibangun harus didukung oleh beberapa aspek, yaitu:

## **1. Aspek kelembagaan**

Rencana pembangunan memorial presiden merupakan salah satu bentuk implementasi dari misi ANRI yaitu melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta juga memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.

Oleh karenanya materi memorial harus menghususkan diri berupa arsip baik dalam bentuk kertas ataupun bentuk media lainnya. Materi memorial diluar arsip seperti benda-benda peninggalan ataupun atribut lainnya yang dimiliki presiden sebisa mungkin dihindari atau diminimalkan karena akan menimbulkan persepsi yang salah dari publik terhadap tugas dan fungsi ANRI, demikian pula memorial-memorial yang lain harus menghususkan diri dengan materi arsip maupun koleksi buku-buku yang dimiliki seorang presiden. Koleksi buku dimungkinkan untuk disajikan karena bagi lembaga kearsipan provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota juga bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan buku-buku perpustakaan.

Untuk memaksimalkan fungsi memorial presiden maka diperlukan reorganisasi dalam struktur organisasi ANRI, harus ada yang bertanggungjawab terhadap kegiatan preservasi dan diseminasi dari memorial, termasuk sebelumnya dengan adanya diorama di ANRI. Struktur organisasi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan memorial dan diorama. Mengingat tugas dan fungsi

memorial dan diorama mempunyai suatu kesamaan, yaitu preservasi dan diseminasi/pemanfaatan arsip dalam bentuk pameran maka diperlukan suatu jenjang kepemimpinan yang mampu mengorganisir pemanfaatan arsip melalui memorial dan diorama yang lebih berdaya guna, untuk itu dibutuhkan struktur organisasi baru setingkat eselonering II, yang didukung oleh eselonering III masing-masing bertanggung secara khusus terhadap memorial dan diorama, dan setiap eselonering III dibantu oleh eselonering IV yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan perawatan, serta penyajian dan layanan publik.

2. Aspek materi/objek

Memorial presiden harus menyajikan arsip yang autentik dan terpercaya, serta menjamin perlindungan kepentingan negara. Untuk maksud dan keperluan tersebut maka diperlukan penelusuran arsip sebelum dilakukan akuisisi arsip kepada pencipta arsip atau pihak-pihak yang memiliki dan menyimpan arsip presiden pada saat periode kepemimpinannya, seperti Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Militer, atau juga kepada ahli waris keluarga presiden. Arsip sebagai materi dari memorial informasinya harus asli, namun bentuk dan mediana dimungkinkan untuk dilakukan reproduksi sehingga dapat dilihat secara jelas oleh publik yang datang ke memorial. Reproduksi terhadap arsip harus disertai dengan informasi mengenai kegiatan reproduksi itu sendiri, hal ini guna menjamin bahwa arsip yang ditampilkan mempunyai informasi yang dapat dipercaya.

Khazanah arsip memorial tidak membatasi terhadap materi arsip mengenai kegiatan presiden atau selama seseorang menduduki jabatan sebagai presiden, materi bisa saja berupa arsip milik seorang presiden ketika yang bersangkutan belum menjabat sebagai presiden. Artinya, materi arsip dimulai dari biografi dari sejak lahir, masa kanak-kanak, sekolah, kegiatan organisasi sosial, aktivitas dalam partai politik, maupun pekerjaan sebelum menjabat presiden. Pada prinsipnya, materi arsip harus dapat menceritakan pencapaian (*hall of fame*) seorang presiden, termasuk kehidupan sosial dan budaya baik itu di lingkungan keluarga, organisasi, partai politik, dan pemerintahan sehingga

pengunjung tertarik dengan materi arsip yang ditampilkan karena arsipnya berfungsi sebagai *center of creativity* dan *catalyst for change*. Oleh karena itu, materi arsip harus mempunyai nilai sejarah, dapat diidentifikasi dari segi historis maupun diketahui periodenya, dan dapat dijadikan bukti dalam penelitian ilmiah.

Materi arsip dalam memorial harus merepresentasikan suatu bentuk komunikasi yang mudah dicerna oleh pengunjung, baik itu melalui sesuatu yang dibaca, dilihat, dan didengar, sebagaimana konsep representasi yang dikemukakan oleh John Fiske.

### 3. Aspek sistem pengelolaan

Pengelolaan memorial hampir sama dengan pengelolaan suatu museum, yang mengutamakan kegiatan preservasi dan pemanfaatan terhadap material. Dalam memorial presiden maka pengelolaan harus diawali dengan kegiatan akuisisi arsip yang akan disimpan dan dipelihara. Proses akuisisi harus menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, disini proses penilaian arsip berperan penting dalam menentukan arsip mana yang akan ditampilkan dalam memorial sehingga informasi arsip menjadi benar-benar membawa dampak yang positif bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat kepemimpinan dari seorang presiden. Semua arsip yang ditampilkan harus diolah terlebih dahulu, sehingga menghasilkan suatu deskripsi yang mampu memberikan kepuasan bagi pengunjung untuk melihat dan membaca arsip yang disajikan dalam memorial. Deskripsi arsip merupakan penjelasan singkat mengenai historis asal usul terciptanya arsip, oleh karenanya diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menuangkannya, sehingga deskripsi arsip dapat memperlihatkan *content* dan *context* arsip dari suatu peristiwa tertentu.

Dalam hal preservasi memorial presiden, karena yang disajikan berupa arsip dengan berbagai bentuk dan medianya maka prioritas preservasi lebih kepada kegiatan preventif, dengan cara melakukan pemeliharaan tidak hanya kepada fisik arsip tetapi juga ruang atau tempat untuk menyimpan dan menyajikan arsip, selain itu melakukan reproduksi terhadap arsip yang informasi menarik bagi pengunjung.

Reproduksi arsip yang dilakukan semata-mata untuk kepuasan pengunjung, sehingga ukuran dan medianya lebih mengutamakan unsur keindahan dan disesuaikan dengan penataan dalam suatu ruang.

4. Aspek prasarana dan sarana

Dalam hal prasarana, maka ANRI harus menyediakan suatu lahan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai bangunan memorial. Izin penggunaan tanah untuk bangunan memorial harus dikonsultasikan kepada pihak yang berkompeten, seperti BPN dan Dinas Tata Kota, termasuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam bangunan memorial ini nantinya akan berperan sebagai *visitor attraction*-memberikan gambaran bagi pengunjung akan perjalanan memoar seorang presiden melalui penyajian arsip dalam segala bentuk dan medianya. Bangunan memorial mempunyai ruang yang terpisah antara seorang presiden dengan presiden yang lainnya, sehingga masyarakat bisa membedakan memori antara presiden yang satu dengan yang lainnya. Setiap memori seorang presiden bisa dikelompokkan sesuai dengan biografi perjalanan seorang presiden. Mengingat khazanah arsip ini autentik maka bangunan memorial harus menjamin terpeliharanya arsip dari segala ancaman kerusakan, baik yang disebabkan oleh faktor fisika, kimia, dan biota, juga kelalaian manusia ataupun bencana. Memorial tidak perlu dilengkapi dengan ruang reproduksi dan restorasi apabila bangunan memorial tersebut menyatu dengan gedung ANRI, tetapi jika terpisah maka perlu ada ruang reproduksi dan restorasi arsip. Bangunan dan ruang memorial harus mengedepankan kepuasan bagi pengunjung dan penikmat seni (*gallery*). Hal lain yang terpenting fisik bangunan harus ditopang dengan kegiatan pelestarian, seperti sarana perawatan arsip (AC, dehumidifier, dan lain-lain), sarana pengamanan (CCTV, alarma system dan sejenisnya). Sementara untuk sarana memorial, lebih mengutamakan sarana yang digunakan dalam kegiatan pameran arsip, termasuk tersedianya ruang studio yang menampilkan arsip audio visual. Sarana-sarana lain yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan perawatan diperlukan apabila bangunan memorial dibangun diluar lokasi ANRI.

5. Aspek SDM

Guna menopang pemanfaatan arsip dalam memorial maka selain jabatan struktural yang melekat pada struktur organisasi, diperlukan juga dukungan jabatan fungsional arsiparis, baik itu jenjang arsiparis tingkat keahlian maupun tingkat keterampilan. Bagi arsiparis yang memiliki jenjang tingkat keahlian mengutamakan pekerjaan dalam rangka akuisisi arsip dan pengolahan arsip, selain itu juga melakukan publikasi arsip, evaluasi pameran arsip, maupun pemandu bagi pengunjung memorial, kegiatan pemandu untuk tingkat keahlian terutama terhadap kunjungan eksklusif seperti pejabat pemerintah dan tamu khusus dari luar negeri. Sementara untuk arsiparis dengan jenjang keterampilan, selain melakukan pekerjaan pengolahan arsip, juga melakukan perawatan arsip (restorasi), serta menjadi pemandu pameran. Arsiparis yang melakukan pemanduan harus didukung dengan kemampuan dalam berkomunikasi tidak hanya dalam bahasa tetapi juga bahasa Inggris, ataupun bahasa asing lainnya, serta kemampuan menguasai informasi dari khazanah arsip yang terdapat di memorial.

Sementara untuk pejabat struktural di memorial, dibutuhkan kemampuan berkoordinasi dengan pihak-pihak pencipta arsip, serta penguasaan terhadap sejarah kepresidenan dari periode kepemimpinan ke periode berikutnya. Selain itu menguasai peraturan mengenai kegiatan permuseuman serta pengoperasionalan dari kegiatan restorasi dan reproduksi. Untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan ruang maka memorial perlu didukung tenaga teknis yang mempunyai kemampuan untuk membersihkan dan memperbaiki instalasi yang mengalami kerusakan.

6. Aspek akses arsip

Memorial secara umum dapat diakses secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pengunjung yang datang langsung ke memorial dapat diberikan brosur mengenai materi dari memorial, ada baiknya brosur dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adanya brosur merupakan panduan awal bagi pengunjung untuk masuk kedalam memorial. Materi brosur hanya menampilkan

## **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia**

pembagian ruang dari periode masing-masing presiden, termasuk pengelompokan materi arsip. Brosur juga dilengkapi dengan arsip foto, terutama arsip foto yang menjadi ikon dari setiap kepemimpinan presiden. Materi brosur ini juga dapat diakses via website [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id).

Memorial harus memosisikan keberadaannya sebagai lembaga yang memamerkan suatu produk, yaitu arsip milik seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden. Oleh karenanya, cara memamerkan suatu produk harus menggunakan pendekatan reflektif. Dalam pendekatan reflektif, memorial merupakan cermin yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari masa kepemimpinan seorang presiden. Proses komunikasi terhadap masyarakat mengenai memorial harus memberikan interpretasi aspek sejarah dan budaya yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*story teller*).



## **BAB V P E N U T U P**

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis terhadap pengelolaan memorial yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

Secara umum pengelolaan memorial merupakan salah satu bentuk tipologis dari museum yang mengkhhususkan pada kegiatan preservasi dan diseminasi koleksi yang menceritakan individu/perorangan, yang telah berjasa dan berperan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Koleksi dari memorial berupa macam-macam jenis dokumen, yaitu artefak, arsip, dan bahan pustaka. Oleh karenanya pengelolaan memorial sama dengan pengelolaan suatu museum yang menitikberatkan kepada pencapaian tujuan strategis dari museum, yaitu penguatan identitas kebudayaan melalui bidang sejarah dan budaya sehingga mampu memberikan representasi informasi tentang aspek kehidupan masa lampau sebagai warisan budaya dan menjadi bagian jati diri bangsa.

Beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan memorial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan memorial dalam aspek kelembagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi pihak lain diluar pemerintah dapat pula mengelola memorial asalkan lembaga tersebut berbadan hukum, mempunyai lokasi dan bangunan, serta mempunyai sumber dana tetap, kemudian dalam pengorganisasiannya didukung oleh unit-unit yang mempunyai fungsi untuk melakukan preservasi dan diseminasi terhadap koleksi;
2. Pengelolaan memorial dalam aspek objek/materi menjadikan memorial sebagai *memory bank* dari koleksi dalam berbagai bentuk jenis dokumen yang berupa artefak, arsip, dan bahan pustaka, termasuk

bentuk monumen ataupun diorama yang menceritakan riwayat perjuangan seseorang dalam kehidupan kebangsaan, sehingga mampu menjadikan memorial sebagai *center of creativity*;

3. Pengelolaan memorial dalam aspek sistem pengelolaan menitikberatkan kepada upaya preservasi terhadap objek sejarah (*attic*) maupun objek berharga dan langka (*treasure trove*) sesuai jenis dan karakteristik dari suatu dokumen yang menjadi koleksi. Sistem pengelolaan memorial tidak terlepas dari lingkup kegiatan dari pendokumentasian terhadap dokumen, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, perawatan, penataan dan penyajian, serta pelayanan masyarakat terhadap koleksi yang ditampilkan;
4. Pengelolaan memorial dalam aspek prasarana dan sarana mengedepankan bangunan prasarana yang mampu memberi jaminan preservasi dan pengamanan terhadap keseluruhan dokumen/koleksi dari adanya ancaman dan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan baik itu oleh faktor fisika, biota, manusia, dan bencana alam, serta tersedianya ruang untuk melakukan pameran tetap (*permanent exhibition*), dan ruang audio visual. Sementara sarana yang digunakan lebih mengutamakan perangkat yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan preservasi mulai dari kegiatan pengelolaan koleksi, restorasi, preparasi, dan bimbingan edukasi, serta memberikan kepuasan bagi pengunjung terutama dalam memanfaatkan memorial sebagai tempat *exclusive club* dalam rangka mengembangkan pengetahuan terhadap koleksi memorial;
5. Pengelolaan memorial dalam aspek SDM mengutamakan personil yang berkemampuan untuk melakukan kegiatan pengelola koleksi (kurator), perawatan koleksi (konservator), penyajian (preparasi) yang berbasis kepada kegiatan preservasi, serta memberikan pelayanan masyarakat dan bimbingan edukasi yang melalui penguasaan wawasan tentang sejarah dan budaya yang terkait dengan koleksi memorial;
6. Pengelolaan memorial dalam aspek akses memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga keberadaannya mampu

mengajak masyarakat untuk berpikir mengenai posisi dan hubungannya dunia luar serta mampu melakukan perubahan (*catalyst for change*).

## **B. Rekomendasi**

ANRI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang kearsipan sesuai dengan visi dan misinya dapat membangun memorial presiden dengan mengutamakan pengkhususan koleksi arsip dari rekam jejak presiden dalam segala bentuk dan medianya. Untuk maksud tersebut dibutuhkan:

1. Kesepakatan dari seluruh jajaran pimpinan birokrat ANRI bahwa rencana pembangunan memorial presiden merupakan bentuk representasi dalam rangka mempertajam visi dan misi ANRI, sekaligus mengenalkan tugas dan fungsi ANRI secara eksplisit kepada masyarakat bahwa pemanfaatan arsip melalui pendekatan reflektif tidak hanya untuk kalangan peneliti saja tetapi juga masyarakat luas yang bangga akan sejarah dan budaya yang dimilikinya;
2. Bangunan khusus yang representatif yang mampu menyimpan, memelihara, dan menyajikan koleksi dari beberapa orang presiden, serta dibutuhkan alokasi pendanaan khusus terkait dengan pengelolaan memorial, mulai dari perolehan atau akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, termasuk penyajian (preparasi) arsip, serta menyediakan akses arsip dalam suatu memorial;
3. Reorganisasi struktur kelembagaan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi 'kaya fungsi, miskin struktur', dengan mengefektifkan secara bersama-sama antara pengelolaan memorial presiden dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) yang telah ada sebelumnya, serta mendayagunakan tugas dan fungsi arsiparis ANRI dalam melakukan profesinya untuk mengelola memorial sebagai warisan budaya dan jati diri bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Cox, Richard J. 1992. *Managing of Institutional Archives Foundational Principles and Practices*. New York: Greenwood Press.

James Gregory Bradsher. 1988. "An Introduction to Archives" dalam *Managing Archives and Archival Institutions*. Mansell Publishing Ltd.

Jan-Werner Muller (Ed).2004. *Myth, Memory and Policy in France since 1945*. Robert Gildea dalam *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of The Past*. Cambridge University Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

*Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor. KM.33/PL.303/MKP/2004* Tentang Museum.

Max Weber. 1978. *Economy and Society*. Guenther Roth dan Calus Wittich (ed)..Berkeley Los Angeles London: University of California.

Moh. Amir Sutaarga. 1982. *Persoalan Museum di Indonesia*, Cetakan VI, Jakarta: Direktorat Perseuman Dit-Jen. Kebudayaan Dep. P & K.

Neiger, M., Meyers, O., Zandberg, E. (Eds.). 2011. *On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age*. London: Palgrave Macmillan.

Paul Ricoeur. *Memory, History, Forgetting*. Diterjemahkan oleh Kathleen Blamey and David Pellauer. Chicago: The University of Chicago Press.

Roby Ardiwidjaja. 2009. Masyarakat Museum "Peran, fungsi dan Manfaat". Dalam *Museografia* Vol.III (4):41-62.

Saafroedin Bahar (et. al.).1995. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Soeri Soeroto. 1980. "Penelitian Bahan-bahan Arsip Masalah dan Kenyataanya" dalam *Arsip dan Sejarah*. Jakarta: ANRI.

Soerjono Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sofyan Cholid. 2009. *Keluarga dalam Perspektif Fungsional. Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sulistyo Basuki. 1992. *Teknik Jasa Dokumentasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Tim Redaksi Tatanusa. 2008. *Kamus Istilah Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1045-1997* (edisi baru). Jakarta: Tatanusa.